

IMPLEMENTASI PELAYANAN SOSIAL LANSIA TERLANTAR DI LINGKUNGAN PONDOK SOSIAL (LIPOSOS) KABUPATEN JEMBER

IMPLEMENTATION OF ELDERLY SOCIAL SERVICE DEPARTED ON SOCIAL COTTAGE ENVIRONMENT (LIPOSOS) JEMBER REGENCY

SKRIPSI

Oleh:

Akhmad Khemal Praditama NIM 120910301083

ILMU KESEJAHTERAANSOSIAL FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK UNIVERSITAS JEMBER 2018



IMPLEMENTASI PELAYANAN SOSIAL LANSIA TERLANTAR DI LINGKUNGAN PONDOK SOSIAL (LIPOSOS) KABUPATEN JEMBER

IMPLEMENTATION OF ELDERLY SOCIAL SERVICES DEPARTED ON SOCIAL COTTAGE ENVIRONMENT (LIPOSOS) JEMBER REGENCY

SKRIPSI

Diajukan guna melengkapi tugas akhir dan memenuhi salah satu syarat Untuk menyelesaikan Program Studi Ilmu Kesejahteraan Sosial (S1) Dan mencapai gelar Sarjana Sosial

Oleh:

Akhmad Khemal Praditama NIM 120910301083

JURUSAN ILMU KESEJAHTERAAN SOSIAL FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK UNIVERSITAS JEMBER 2018

PERSEMBAHAN

Dengan mengucap syukur kepada Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan hidayahnya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan baik dan lancar. Skripsi ini saya persembahkan kepada:

- Ayahanda tercinta Edy Sukamto dan Ibunda tercinta Vera Pramiyati yang tiada henti memberikan dukungan, kasih sayang, pengorbanan, serta mendoakan untuk setiap langkahku dengan ketulusan hati untuk keberhasilan dan kesuksesanku.
- Keluarga Besar kakek Said, Nenek Siyama, Kakek Djoemali, dan Om Tercinta Alm. Akhmad Prayudi terima kasih telah memberikan senyuman, semangat dan doa, serta mendoakanku.
- Guruku sejak Sekolah Dasar hingga Perguruan Tinggi. Terima kasih telah memberikan ilmunya serta membimbing dengan rasa sabar dan tulus.
- Terimakasih Kepada Teman-teman seangkatan jurusan Ilmu Kesejahteraan Sosial 2012 yang sudah memberikan semangat dan member keceriaan selama masa perkuliahan
- 5. Almamater Tercinta Jurusan Ilmu Kesejahteraan Sosial, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Jember.

MOTTO

"Tiadanya Keyakinanlah Yang Membuat Orang Takut Menghadapi Tantangan Dan Saya Percaya Pada Diri Saya Sendiri"

(Thomas Alva Edison)

The only to do great work is to love what you do.

(Steve Jobs)

^{*)} https://www.seniberpikir.com

^{**)}Dikutip dari buku "Crazy Billionaires Speak

PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama: Akhmad Khemal Praditama

NIM: 120910301083

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa karya ilmiah yang berjudul "Implementasi Pelayanan Sosial Lansia Terlantar Di Lingkungan Pondok Sosial (LIPOSOS) Kabupaten Jember" adalah benar-benar hasil karya saya sendiri, kecuali dalam pengutipan substansi disebut sumbernya.Saya bertanggung jawab atas keabsahan dan kebenaraan isinya sesuai dengan sikap ilmiah yang harus dijunjung tinggi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengaan sebenarnya, tanpa ada tekanan dan paksaan dari pihak manapun serta bersedia mendapat sanksi akademik jika ternyata dikemudian hari pernyataan ini tidak benar adanya.

Jember, 19 November 2018 Yang menyatakan,

Akhmad Khemal Praditama

NIM 120910301083

SKRIPSI

IMPLEMENTASI PELAYANAN SOSIAL LANSIA TERLANTAR DI LINGKUNGAN PONDOK SOSIAL (LIPOSOS) KABUPATEN JEMBER

Oleh:

Akhmad Khemal Praditama

NIM 120910301083

Dosen Pembimbing:

Belgis Hayyinatun Nufus, S.Sos, M.Kesos.

NIP: 198904232018032

PENGESAHAN

Skripsi berjudul "Implementasi Pelayanan Sosial Lansia Terlantar Di Lingkungan Pondok Sosial (LIPOSOS) Kabupaten Jember" Telah diuji dan disahkan pada :

Hari/Tanggal: Senin, 19 November 2018

Tempat : Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember

Tim Penguji:

Ketua, Sekretaris,

<u>Drs.Partono, M.Si</u> NIP. 195608051986031003 Belgis H. Nufus, S.Sos. M,Kesos. NIP. 198904232018032001

Anggota 1

<u>Dr. Hadi Prayitno, M.Kes</u> NIP. 196106081988021001

Mengesahkan,

<u>Dr. Ardiyanto, M.Si</u> NIP. 195808101987021002

RINGKASAN

"Implementasi Pelayanan Sosial Lansia Terlantar Di Lingkungan Pondok Sosial (LIPOSOS) Kabupaten Jember"; Akhmad Khemal Praditama, 120910301083; 73 Halaman; Jurusan Ilmu Kesejahteraan Sosial, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Jember. Pelayanan sosial melalui Unit Pelaksana Teknis Lingkungan Pondok Sosial (LIPOSOS) di Kota Jember merupakan salah satu upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat terutama penduduk lanjut usia terlantar.

Sebagai upaya adanya tempat penampungan sementara untuk lanjut usia terlantar yang ada di Jember, maka dilakukan upaya sebagai langkah untuk mencapai kondisi maksimum atau optimal bagi lanjut usia terlantar dengan memberikan pelayanan sosial. Unit Pelaksana Teknis Lingkungan Pondok Sosial (LIPOSOS) Kabupaten Jember merupakan salah satu wadah yang ditunjuk Pemerintah dalam menampung lanjut usia terlantar di Jember. Fungsi dari adanya pelayanan sosial ini adalah mengupayakan kehidupan lanjut usia lebih bermakna bagi diri sendiri, keluarga, dan masyarakat. Unit Pelaksanaan Teknis Pelayanan Sosial Lingkungan Pondok Sosial (LIPOSOS) Jember merupakan tempat pelayanan sosial bagi lanjut usia terlantar yang bersifat tidak permanen, sehingga masih dapat untuk berhubungan dengan keluarga aslinya atau dipulangkan ketempat asalnya. Unit Pelaksanaan Teknis Pelayanan Sosial Lingkungan Pondok Sosial (LIPOSOS) Jember juga termasuk dalam institusional pelayanan dasar yaitu dalam pelayanan individu yang mengalami masalah ditempatkan dalam lembaga pelayanan sosial. Unit Pelaksanaan Teknis Lingkungan Pondok Sosial juga sebagai tempat berkumpulnya lanjut usia yang baik sehat jamaninya ataupun diserahkan oleh pihak instansi pemerintahan polisi, satpol pp, perangkat desa untuk diurus segala keperluannya untuk masuk ke Unit Pelaksana Teknis Lingkungan Pondok Sosial.

Di Kabupaten Jember, jumlah lansia semakin meningkat setiap tahunnya. Penelitian yang telah dilakukan dari tahun 2013, 2014 sampai 2015, data lansia terlantar semakin bertambah di kecamatan dengan berbagai persoalan yang

dialami lansia. Besarnya angka lansia terlantar di Kabupaten Jember disebabkan dengan beberapa faktor diantaranya faktor perkonomian, ketiadaan anak keluarga, kerabat maupun masyarakat lingkungan yang dapat memberikan bantuan tempat tinggal dan kehidupannya. Lansia Terlantar di Kabupaten Jember yang ada di lingkungan pondok sosial (LIPOSOS) juga memiliki permasalahan tidak mau dipulangkan lebih memilih tinggal di lingkungan pondok sosial dikarenakan keluarga tidak ingin menerima atau merawat kembali. Setelah lansia meninggal keluarga mencari orangtua tersebut dikarenakan ahli waris meminta surat keterangan meninggal di pihak UPT Lingkungan Pondok Sosial (LIPOSOS).

Untuk memenuhi kebutuhan dasar lanjut usia terlantar yang dibutuhkan, pemerintah mempunyai kebijakan untuk lanjut usia terlantar dengan memberikan program atau pelayanan sosial yang harus dan dilaksanakan pada Unit Pelaksana Teknis Pelayanan Sosial Lingkungan Pondok Sosial (LIPOSOS) Jember. Program-program pelayanan sosial untuk lanjut usia ini ditujukan untuk meningkatkan kualitas hidup, meningkatkan kesejahteraan lanjut usia, dan terpenuhinya kebutuhan dasar lanjut usia. Pelayanan sosial yang terdapat di Unit Pelaksana Teknis Lingkungan Ponsok Sosial Jember mengupayakan kehidupan lanjut usia lebih bermakna bagi dirinya sendiri, keluarga, dan masyarakat dengan dilakukannya beberapa tahapan pelayanan sosial, mulai dari pendekatan awal sebagai cara memilih calon klien dengan berbagai persyaratan dan kriteria yang diberikan oleh Unit Pelaksana Teknis Pelayanan Sosial Lansia Terlantar di Lingkungan Pondok Sosial (LIPOSOS) Kabupaten Jember sampai dengan bagaimana menangani lanjut usia dengan berbagai Tahap-tahap yang diberikan agar lanjut usia ini memiliki kualitas hidup yang lebih baik dan dapat diterima. Hal ini yang menjadi indikator kesejahteraan lanjut usia terlantar.

PRAKATA

Puji syukur Alhamdulillah penulis panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa yang telah melimpahkan rahmat, taufiq, dan hidayahnya sehingga saya dapat menyelesaikan skripsi dengan judul "Implementasi Pelayanan Sosial Lansia Terlantar Di Lingkungan Pondok Sosial (LIPOSOS) Kabupaten Jember", dan Karya Ilmiah ini merupakan salah satu syarat untuk menyelesaikan Program Strata Satu di Jurusan Ilmu Kesejahteraan Sosial, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember.

Penulis menyadari bahwa penulisan karya tulis ini, masih jauh dari sempurna, walaupun usaha untuk menyempurnakannya sudah saya lakukan secara maksimal.Oleh sebab itu, penulis sangat mengharapkan adanya kritik dan saran yang membangun dan konstruktif dari semua pihak. Tanpa mengurangi rasa hormat, terima kasih saya sampaikan kepada :

- 1. Dr. Ardiyanto, M.Si selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik.
- 2. Dr. Pairan, M.Si selaku Ketua Jurusan Ilmu Kesejahteraan Sosial.
- 3. Belgis Hayyinatun Nufus, S.Sos, M.Kesos.selaku Dosen Pembimbing yang telah meluangkan waktu, pikiran, dan perhatian dalam penulisan skripsi ini.
- 4. Djoko Wahyu M.Si selaku Dosen Pembimbing Akademik selama penulis menjadi mahasiswi.
- 5. Ketua Penguji Drs. Partono, M.Si
- 6. Anggota Penguji Dr. Hadi Prayitno, M.Kesos
- 7. Bapak dan Ibu Dosen Jurusan Ilmu Kesejahteraan Sosial yang telah mendidik dan memberikan banyak pengetahuan serta pengalaman kepada penulis selama menjadi mahasiswi.
- 8. Seluruh Staf Akademik dan Kemahasiswaan atas bantuan untuk kelancaran penulis terutama kepada Mas Rizqi selaku operator jurusan.
- 9. Pekerja sosial dan seluruh pegawai Unit Pelaksan Teknis Lingkungan Pondok Sosial (LIPOSOS) Jember yang telah membantu penulis mendapatkan data selama melakukan penelitian.

- 10. Keluarga saya: Ayahanda tercinta Edy Sukamto Dan Ibunda tercinta Vera Pramiyati yang selalu memberikan energi postif, dukungan dan doa
- 11. Sahabat terbaik dan tersetia teruntuk Devis Gilang, Riski Tri Galan, Sofyan Perdana, Dhimas, Anggun, Andi Wawan, Galih Wahyu, Decky.yang selalu menjaga semangat penulis dalam proses skripsi, menghibur dan mewarnai hari-hari selamaa ini.
- 12. Calon Istri Saya, Riyadotul Khofifiyah yang membangkitkan semangat penulis dan menjadikan saya kuat dan sabar.
- 13. Sahabat sepermainan yang selalu memberi semangat, kenangan terindah di kampus dan memberikan bantuan selama ini teruntuk M. Rizal.
- 14. Keluarga Besar All-Artis Football Club, Soccer School Jember Football Club, dan Jember Putra Football selalu mensuport saya.
- 15. Teman seperjuangan Jurusan Ilmu Kesejahteraan Sosial 2014 Universitas Jember.
- 16. Semua pihak yang tidak bisa disebutkan satu persatu.

Semoga segala bantuan, partisipasi dan dukungan yang diberikan kepada penulis menjadi amal baik dan mendapat balasan dari Allah SWT.Semoga skripsi ini dapat bermanfaaat bagi pembaca.

Jember, 19 November 2018

Penulis

DAFTAR ISI

Hala	man
HALAMAN JUDUL	ii
HALAMAN PERSEMBAHAN	iii
HALAMAN MOTTO	iv
HALAMAN PERNYATAAN	v
HALAMAN PEMBIMBING	vi
HALAMAN PENGESAHAN	vii
RINGKASAN	viii
PRAKATA	X
DAFTAR ISI	xii
DAFTAR TABEL	xiv
DAFTAR GAMBAR	xv
DAFTAR LAMPIRAN	xvi
BAB 1. PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	7
1.3 Tujuan Penelitian	8
1.4 Manfaat Penelitian	8
BAB 2. TINJAUAN PUSTAKA	10
2.1 Implementasi Pelayanan	11
2.2 Lansia (Lanjut Usia)	14
2.3 Perlindungan Sosial	15
2.4 Pelayanan Sosial	20
2.5 Keberfungsian Sosial	24
2.6 Kajian Penelitian Terdahulu	25
2.7 Kerangka Berpikir	29

BAB 3	. METODE PENELITIAN	31
	3.1 Pendekatan dan Jenis Penelitian	31
	3.2 Penentuan Lokasi Penelitian	32
	3.3 Teknik Penentuan Informan	32
	3.3.1 Informan Pokok	33
	3.3.2 Informan Tambahan	33
	3.4 Teknik Pengumpulan Data	34
	3.4.1 Observasi	34
	3.4.2 Wawancara	36
	3.4.3 Dokumentasi	38
	3.5 Analisis Data	39
	3.6 Teknik Keabsahan Data	41
BAB 4	. HASIL DAN PEMBAHASAN	44
	4.1 Hasil Penelitian	44
	4.1.1 Sejarah Singkat Berdirinya (LIPOSOS)	44
	4.1.2 Visi dan Misi	45
	4.1.3 Tugas Pokok dan Fungsi	45
	4.1.4 Data Karyawan UPT LIPOSOS	47
	4.1.5 Struktur Organisasi UPT LIPOSOS	48
	4.1.6 Proses Penerimaan Klien	49
	4.1.7 Pelayanan Sosial Lanjut Usia	50
	4.2 Pembahasan	54
	4.2.1 Tahap Pendekatan Awal	55
	4.2.2 Tahap Penerimaan	57
	4.2.3 Tahap Bimbingan	60
	4.2.4 Tahap Terminasi	63
BAB 5	PENUTUP	67
	5.1 Kesimpulan	66
	5.2 Saran	69
Daftra	r Pustaka	71

DAFTAR TABEL

1.1	Jumlah Lansia Terlantar Kabupaten Jember	6
2.1	Kajian Penelitian Terdahulu	27
3.1	Informan Tambahan	34
4.1	Rekapitulasi Data	47



DAFTAR GAMBAR

2.1	Alur Pikir Konsep Penelitian	30
3.1	Metode Analisis Data	39
4.1	Struktur Organisasi	48

DAFTAR LAMPIRAN

- 1. Penelitian Terdahulu
- 2. Taksonomi Penelitian Pelayanan sosial Lansia Terlantar (LIPOSOS)
- 3. SOP (Standart Operating Prosedur)
- 4. Pedoman Wawancara Penelitian
- 5. Lampiran Koding
- 6. Lampiran Analisis, Kesimpulan awal dan Kesimpulan akhir
- 7. Dokumentasi Penelitian
- 8. Surat Penelitian

BAB 1. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Biro Pusat Statistik (BPS) memproyeksikan jumlah lansia di Indonesia tahun 2005-2010 sama dengan jumlah balita yaitu 8,5% dari total penduduk atau 19,9 juta. Pada tahun 2020 jumlah lansia menjadi 28,8 juta atau 11,34% dari seluruh populasi. Di tahun 2025 seperlima penduduk di Indonesia adalah lansia. Peningkatan jumlah lansia diperkirakan di ikuti dengan peningkatan usia harapan hidup dari usia 59,8 tahun pada tahun 1990 menjadi 67,4 tahun pada tahun 2005 dan menjadi 71,7 tahun pada tahun 2020. Peningkatan usia harapan hidup ini sesuai dengan Undang-Undang No 13 tahun 1998 tentang Kesejahteraan Lanjut Usia yang menyatakan bahwa pembangunan nasional yang bertujuan mewujudkan masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, telah menghasilkan kondisi sosial masyarakat yang makin membaik dan usia harapan hidup makin meningkat, sehingga jumlah lanjut usia makin bertambah. Dengan adanya undang-undang ini lansia mendapatkan suatu perhatian tersendiri dari pemeritah indonesia, Jumlah penduduk lanjut usia bertambah sejalan dengan proses penuaan penduduk. Proses penuaan penduduk dapat diartikan sebagai proses penambahan usia, dari penduduk usia balita yang nantinya kan tergolong penduduk usia tua (lansia). Selama proses penuaan tersebut, pada masing-masing individu tentu tidak dapat terlepas dari pemenuhan kebutuhan dasar seperti aspek kesehatan fisik dan psikologis, tetapi juga membawa berbagai implikasi baik dari aspek sosial, ekonomi dan sebagainnya.

Badan Pusat Statistik Jawa Timur memproyeksikan jumlah penduduk berusia 60-64 tahun 2012 sebanyak 1,3 juta jiwa sedangkan pada tahun 2013 sebanyak 1,4 juta jiwa. Penduduk usia 65-69 tahun pada tahun 2012 sebanyak 1,03 juta jiwa sedangkan pada tahun 2013 sebanyak 1,06 juta jiwa. Penduduk usia 70 tahun ke atas pada tahun 2012 sebanyak 1,67 juta jiwa sedangkan pada tahun 2013 sebanyak 1,7 jiwa. Pulau Jawa merupakan salah satu dari banyak pulau di Indonesia dengan jumlah penduduk yang sangat besar, namun tidak sedikit pula permasalahan yang dapat terjadi, salah satu permasalahan di pulau Jawa terutama

untuk Jawa Timur adalah masalah terlantarnya manula atau lansia, hal tersebut merupakan masalah yang sangat sering terjadi. Jika kita lihat banyak sekali orang-orang lanjut usia yang tidur di depan toko, mengemis di jalan atau lampu merah dan sangat jauh dari kata sejahtera. Untuk menangani masalah tersebut, pemerintah pusat bekerja sama dengan pemerintah daerah untuk membangun sebuah pusat pelayanan bagi lansia baik di bidang kesehatan, keterampilan dengan tujuan untuk mengentas para lansia agar tidak terlantar di jalanan.

Penduduk lansia terlantar dianggap sebagai penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS), karena mereka memiliki kehidupan yang tidak layak secara kemanusiaan dan memiliki kriteria masalah sosial diantaranya kemiskinan dan ketelantaran. Mereka tidak terpenuhi kebutuhan dasarnya seperti sandang, pangan, dan papan dan terlantar secara psikis, dan sosial (Lampiran Permensos No. 08 Tahun 2012). Peraturan Pemerintah RI Nomor 43 Tahun 2004 Tentang Pelaksanaan Upaya Peningkatan Kesejahteraan Sosial Lanjut Usia adalah serangkaian kegiatan yang dilaksanakan secara terkordinasi antara pemerintah dan masyarakat untuk memberdayakan lanjut usia agar lanjut usia tetap dapat melaksanakan fungsi sosialnya dan berperan aktif secara wajar dalam hidup bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2009 Tentang Kesejahteraan Sosial adalah kondisi terpenuhinya kebutuhan material, spiritual, dan sosial warga negara agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri, sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya.

Perlindungan sosial merupakan hak asasi yang dimiliki oleh setiap warga Negara. Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan rehabilitas sosial diatur dalam peraturan pemerintah. Ada beberapa contoh sosial yang dimaksud yaitu menjamin fakir miskin, anak yatim piatu terlantar, lanjut usia terlantar, penyandang cacat fisik dan mental, eks penderita penyakit kronis yang mengalami masalah ketidak mampuan sosial-ekonomi agar kebutuhan dasarnya terpenuhi.

Kabupaten Jember memiliki sebuah wadah pelayanan sosial sebagai tempat tinggal lanjut usia terlantar, yaitu Unit Pelaksana Teknis di bawah naungan Dinas Sosial, Lingkungan Pondok Sosial (LIPOSOS) Kabupaten Jember. yang berlokasi di Kecamatan Kaliwates, Jalan Tawes No. 306 Kabupaten Jember.

Tidak semua penduduk lanjut usia Kabupaten Jember ditampung di Unit Pelaksana Teknis Lingkungan Pondok Sosial (LIPOSOS) Jember. Karena lingkungan pondok sosial sendiri hanya tempat sementara bukan untuk tempat tinggal selamanya.

Sebagai upaya adanya tempat penampungan sementara untuk lanjut usia terlantar yang ada di Jember, maka dilakukan upaya sebagai langkah untuk mencapai kondisi maksimum atau optimal bagi lanjut usia terlantar dengan memberikan pelayanan sosial. Unit Pelaksana Teknis Lingkungan Pondok Sosial (LIPOSOS) Kabupaten Jember merupakan salah satu wadah yang ditunjuk Pemerintah dalam menampung lanjut usia terlantar di Jember. Fungsi dari adanya pelayanan sosial ini adalah mengupayakan kehidupan lanjut usia lebih bermakna bagi diri sendiri, keluarga, dan masyarakat. Unit Pelaksanaan Teknis Pelayanan Sosial Lingkungan Pondok Sosial (LIPOSOS) Jember merupakan tempat pelayanan sosial bagi lanjut usia terlantar yang bersifat tidak permanen, sehingga masih dapat untuk berhubungan dengan keluarga aslinya atau dipulangkan ketempat asalnya. Unit Pelaksanaan Teknis Pelayanan Sosial Lingkungan Pondok Sosial (LIPOSOS) Jember juga termasuk dalam institusional pelayanan dasar yaitu dalam pelayanan individu yang mengalami masalah ditempatkan dalam lembaga pelayanan sosial. Unit Pelaksanaan Teknis Lingkungan Pondok Sosial juga sebagai tempat berkumpulnya lanjut usia yang baik sehat jamaninya ataupun diserahkan oleh pihak instansi pemerintahan polisi, satpol pp, perangkat desa untuk diurus segala keperluannya untuk masuk ke Unit Pelaksana Teknis Lingkungan Pondok Sosial. Hal ini merupakan tanggung jawab dan kewajiban Negara untuk menjaga dan memelihara setiap warga negaranya sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang No. 12 Tahun 1996 (Direktorat Jenderal, Departemen Hukum dan HAM). Sedangkan menurut Departemen Sosial Republik Indonesia, Lingkungan Pondok Sosial (LIPOSOS) adalah suatu tempat untuk menampung lanjut usia terlantar dengan memberikan pelayanan sehingga mereka merasa aman, tenteram dengan tiada perasaan gelisah maupun khawatir dalam menghadapi lanjut usia.

Pelayanan dalam Unit Pelaksanaan Teknis Lingkungan Pondok Sosial (LIPOSOS) Jember meliputi pemberian pangan, sandang, papan, pemeliharaan kesehatan, dan pelayanan bimbingan mental, serta pengisian waktu luang termasuk didalamnya bernyanyi atau curhat kepada pekerja sosial atau pekerja medis yang ada di lingkungan pondok sosial tentang anak atau saudara yang tidak mau mengurusnya. Pelayanan yang diberikan oleh Unit Pelaksanaan Teknis Lingkungan Pondok Sosial (LIPOSOS) Jember kepada lansia dengan berbagai Tahap dan mempunyai tujuan akhir yaitu untuk meningkatkan keberfungsian sosial lansia itu sendiri dan terwujudnya kesejahteraan lansia yang berpengaruh terhadap kemampuan lansia untuk melewati masa tuanya dengan berbagai penurunan fisik dan pemikiran, sehingga lansia dapat berperan aktif di berbagai kegiatan tanpa adanya rasa beban maupun rasa bersalah karena kurangnya pendampingan dari pihak keluarga. Tahap-tahap itu meliputi Tahap Pendekatan Awal, Tahap Penerimaan, Tahap Bimbingan, dan Tahap Terminasi.

Upaya pelaksanaan proses pelayanan sosial terhadap lanjut usia terlantar dengan tujuan meningkatkan keberfungsian sosial lansia itu sendiri dan terwujudnya kesejahteraan lansia salah satunya memunculkan kembali kepercayaandiri mereka dengan cara memberi pelayanan atau bimbingan terhadap lanjut usia secara maksimal. Hal ini bertujuan agar lanjut usia setelah dipulangkan atau dikembalikan bisa hidup mandiri dan tidak tergantung terhadap orang lain. Bimbingan yang diberikan kepada lansia dari unit pelaksana teknis lingkungan pondok sosial dapat berjalan dengan baik apabila kondisi lanjut usia terlantar sendiri memiliki mental yang sehat, sosial di masyarakat bagus, selalu menjaga kesehatan fisiknya, dan taat beragama. Kondisi lanjut usia terlantar diatas akan terbentuk dengan adanya bimbingan-bimbingan yang akan mengembalikan keberfungsian lanjut usia terlantar itu sendiri. Dengan kondisi mental yang sehat, pihak Unit Pelaksana Teknis Lingkungan Pondok Sosial (LIPOSOS) Kabupaten Jember memberikan bimbingan berupa bimbingan mental. Kondisi mental yang sehat dibutuhkan juga adanya kondisi fisik yang kuat agar dapat melakukan kegiatan apapun dengan lancar, maka dalam menjaga kesehatan fisiknya, Unit Pelaksa Teknis Lingkungan Pondok Sosial (LIPOSOS) Jember

setiap pagi melakukan aktifitas pemeriksaan kondisi kesehatan lansia. Terbentuknya bimbingan-bimbingan ini nanti yang dapat mengembalikan kesejahteraan sosial bagi lanjut usia terlantar.

Upaya Unit Pelaksana Teknis Lingkungan Pondok Sosial (LIPOSOS) Jember dalam pelayanan sosial lanjut usia untuk mengembalikan keberfungsian sosial dan mensejahterakan lanjut usia terlantar searah dengan prinsip kesejahteraan sosial yang berbunyi bahwa kesejahteraan sosial adalah kondisi terpenuhinya kebutuhan material, spiritual, dan sosial warga negara agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri, sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya. Melaksanakan fungsi sosialnya ini diperlukan beberapa upaya bimbingan yang meliputi kesehataan fisik yang prima, mental yang sehat, produktif, dan memiliki sosialisasi yang baik agar nantinya lanjut usia terlantar ini dapat hidup dengan sejahtera. Dalam upaya mencapai kondisi sejahtera dari lansia terlantar, Unit Pelaksana Teknis Lingkungan Pondok Sosial (LIPOSOS) dalam usaha Kesejahteraan Sosial yang bersifat kemanusiaan dengan cara memberikan layanan-layanan sosial semata-mata untuk membantu para lansia terlantar mencapai kondisi sejahtera di mana kebutuhan yang utama telah diberikan dan telah terjamin. Unit Lingkungan Pondok Sosial (LIPOSOS) Jember juga membantu para lansia terlantar dalam menyelesaikan masalah-masalah yang dianggap sulit untuk diselesaikan dan juga membantu para lansia dalam upaya pengembangan diri sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya. Untuk melaksanakan pelayanan ini berdasarkan kesejahteraan sosial diperlukan langkahlangkah sistematik yang bisa dipertanggung-jawabkan secara akademis. Berdasarkan fenomena tersebut peneliti ingin mengetahui sesuai dengan bidang ilmunya "pelayanan sosial pada lanjut usia terlantar di Unit Pelaksana Teknis Lingkungan Pondok Sosial (LIPOSOS) Kabupaten Jember."

Di Kabupaten Jember, jumlah lansia semakin meningkat setiap tahunnya. Penelitian yang telah dilakukan dari tahun 2013, 2014 sampai 2015, data lansia terlantar semakin bertambah di kecamatan dengan berbagai persoalan yang dialami lansia.

Tabel 1.1 Jumlah Lansia Terlantar Di Kabupaten Jember

Kecamatan	Jumlah Lansia Terlantar Tahun 2013	Jumlah Lansia Terlantar Tahun 2014	Jumlah Lansia Terlantar Tahun 2015
Patrang	53	87	132
Balung	78	96	131
Ambulu	386	439	664
Mumbulsari	186	264	272
Tempurejo	167	178	242
Jelbuk	899	978	1062
Kalisat	487	512	552
Semboro	18	21	38
Sumberjambe	38	57	72
Sumberbaru	6	16	26
Sukorambi	5	19	21
Sumbersari	67	143	195
Umbulsari	289	375	472
Puger	134	189	256
Ajung	53	76	98
Mayang	389	465	568
Rambipuji	257	279	377
Pakusari	374	433	525
Kencong	67	98	121
Bangsalsari	383	423	542
Jenggawah	421	433	550
Ledokombo	1254	1287	1383
Jombang	98	103	113
Wuluhan	256	287	297
Sukowono	578	624	643
Kaliwates	165	183	193
Arjasa	178	285	303
Panti	32	38	48
Tanggul	146	158	200
Gumukmas	25	27	29
Silo	342	365	386
Jumlah Keseluruhan	7831	8938	10.511

Sumber data: Dinas Sosial Kabupaten Jember (2015)

Besarnya angka lansia terlantar di Kabupaten Jember disebabkan dengan beberapa faktor diantaranya faktor perkonomian, ketiadaan anak keluarga, kerabat maupun masyarakat lingkungan yang dapat memberikan bantuan tempat tinggal dan kehidupannya. Lansia Terlantar di Kabupaten Jember yang ada di lingkungan

pondok sosial (LIPOSOS) juga memiliki permasalahan tidak mau dipulangkan lebih memilih tinggal di lingkungan pondok sosial dikarenakan keluarga tidak ingin menerima atau merawat kembali. Setelah lansia meninggal keluarga mencari orangtua tersebut dikarenakan ahli waris meminta surat keterangan meninggal di pihak UPT Lingkungan Pondok Sosial (LIPOSOS).

Lingkungan Pondok Sosial (LIPOSOS) Kabupaten Jember merupakan lembaga yang memberikan pelayanan sosial yang ada di Kabupaten Jember. Berdiri sejak tahun 1983 yang di kelola provinsi sebagai tanah hibah dari PTPN27. Selanjutnya paska otonomi daerah dihibakan ke Pemkab Jember. Sejak berdirinya sampai sekarang pelayanan sosial kepada lansia yang diberikan oleh Liposos di nilai sangat baik oleh beberapa dinas sosial yang lain. Sehingga, pelayanan sosial yang di lakukan Liposos Kabupaten Jember di jadikan bahan rujukan dan studi banding oleh dinas sosial yang lain, seperti Dinas Sosial Bantul (http://dialogtvnews.com/23/10/2018), Dinas Sosial Blitar (http://petisi.co /24/10/2018). Selain dua Dinas Sosial tersebut, Dinas Sosial Probolinggo dan Dinas Sosial Kediri juga melakukan kunjungan untuk belajar pelayanan sosial terhadap lansia yang ada di LIPOSOS Kabupaten Jember. (hasil observasi awal/22/01/2017).

1.2 Rumusan Masalah

Perumusan masalah diperlukan dalam suatu penelitian untuk mencapai hasil yang di harapkan. Perumusan masalah timbul karena adanya tantangan, kesaksian ataupun kebingungan terhadap suatu hal atau fenomena. Masalah menurut Guba dalam Moleong (2005:95) adalah "suatu keadaan yang bersumber dari hubungan dua faktor atau lebih yang menghasilkan situasi yang menimbulkan tanda-tanda dan dengan sendirinya memerlukan upaya untuk mencari suatu jawaban" dalam arti lain masalah adalah suatu keadaan kondisi labil yang bisa terjadi pada setiap individu, kelompok ataupun komunitas dan untuk itu perlu jawaban atau sebuah solusi agar dapat keluar dari masalah tersebut.

Adanya berbagai permasalahan lanjut usia atau lansia yang dihadapi oleh keluarga dan masyarakat yang berhubungan dengan kebutuhan akan pelayanan bagi lansia menyebabkan lansia semakin tahun semakin meningkat. Untuk menangani masalah ini melalui Dinas Sosial UPT Lingkungan Pondok Sosial (LIPOSOS) Kabupaten Jember memberikan pelayanan sosial kepada lansia. Pelayanan Sosial yang di berikan LIPOSOS Kabupaten Jember menjadi bahan rujukan oleh Dinas Sosial yang lain karena dinilai pelayanan sosial yang di berikan kepada Lansia sangat baik. Dengan fenomena tersebut, masalah yang akan diteliti adalah "Bagaimana Implementasi Pelayanan Sosial Lansia Terlantar Di Lingkungan Pondok Sosial (LIPOSOS) Kabupaten Jember?"

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian merupakan suatu hakekat mengapa penelitian harus dilakukan. Tujuan penelitian diarahkan untuk memenuhi fenomena sosial. Penelitian dilakukan bertujuan untuk melihat, mendeskripsikan dan menganalisa objek penelitian. Berdasarkan dengan latar belakang masalah dan rumusan masalah maka tujuan penelitian ini adalah mendeskripsikan Implementasi Pelayanan Sosial Lansia Terlantar di Lingkungan Pondok Sosial (LIPOSOS) Kabupaten Jember.

1.4 Manfaat Penelitian

Dalam penelitian ini dengan adanya tujuan tersebut manfaat yang diperoleh dari penelitian ini sangat penting untuk dikembangkan. Manfaat dari penelitian ini adalah:

- 1. Menambah pengetahuan, keterampilan dan kemampuan dalam menganalisis dan memecahkan suatu masalah kesejahteraan sosial.
- 2. Merupakan sarana pelatihan dan penerapan teori yang telah di dapatkan selama perkuliahan dengan praktek di lapangan.
- Mengetahui dan mengkaji pelayanan sosial di Unit Pelaksana Teknis Lingkungan Pondok Sosial (LIPOSOS), terhadap lanjut usia terlantar sebagai upaya peningkatan pelayanan lanjut usia terlantar di Kabupaten Jember.
- 4. Sebagai referensi dalam penelitian selanjutnya dan dapat mengetahui tentang bagaimana Pelayanan sosial kepada lansia.

Memperoleh bekal yang memadai dari pengalaman-pengalaman selama melakukan penelitian terutama pengetahuan tentang pelayanan program lansia terlantar.



BAB 2. TINJAUAN PUSTAKA

Pelayanan sosial sendiri memiliki tujuan untuk mengembalikan keberfungsian sosial lanjut usia terlantar. Lanjut usia merupakan keadaan yang ditandai oleh kegagalan seseorang untuk mempertahankan keseimbangan terhadap kondisi stres fisiologis. Kegagalan ini berkaitan dengan penurunan daya kemampuan untuk hidup serta peningkatan kepekaan secara individual. Lanjut usia juga dapat dikatakan dimana proses menua pada umumnya dianggap menyebabkan menurunnya keadaan fisik dan intelektual. Keadaan fisik yang dimaksud adalah kulit berubah menjadi lemas, berkeriput, dan kehilangan cahaya, gigi-gigi mulai keropos dan gusi mulai menyusut, perontokan rambut, dan denyut jantung menurun. Sedangkan faktor intelektual itu ditandai dengan adanya ingatan jangka pendek. Penururunan fisik dan penurunan intelektual tersebut menghambat para lanjut usia terlantar untuk mencapai keberfungsian sosial yang seharusnya terpenuhi.

Keberfungsian sosial yang diharapkan akan muncul dengan adanya usaha-usaha yang dilakukan baik oleh pemerintah atau dari masyarakat itu sendiri. Untuk memenuhi keberfungsian lanjut usia tersebut dan mengurangi penyandang masalah kesejahteraan sosial terkhusus bagi lanjut usia, maka pemerintah membuat suatu kebijakan akan hal itu. Salah satu usaha pemerintah mendirikan pelayanan sosial ini dengan mempekerjakan pekerja sosial yang nantinya akan membantu lanjut usia terlantar ini menyelesaikan masalah sosialnya. Untuk melengkapi keberfungsian sosial tersebut, maka pemerintah membuat suatu kebijakan sosial dimana kebijakan sosial itu sendiri adalah usaha yang dilakukan pemerintah sebagai upaya untuk meningkatkan kualitas hidup manusia melalui pemberian pelayanan kemasyarakatan.

Mencapai kesejahteraan sosial lanjut usia terlantar diperlukan upaya perlindungan dan pelayanan yang bersifat terus-menerus agar lanjut usia dapat rnewujudkan dan menikmati taraf hidup yang wajar. Perlindungan sosial menurut (Edi Suharto, 2006:87) adalah elemen penting strategi kebijakan publik dalam memerangi kemiskinan dan mengurangi penderitaaan multidimensi yang dialami

kelompok-kelompok lemah dan kurang beruntung. Maka, perlindungan sosial satu tipe dari kebijakan sosial yang menunjuk pada berbagai bentuk pelayanan, ketetapan atau program yang dikembangkan oleh pemerintah untuk melindungi warganya, terutama kelompok rentan dan kurang beruntung, dari berbagai macam resiko ekonomi, sosial, dan politik yang akan senantiasa menerpa kehidupan mereka.

2.1 Implementasi Pelayanan

Implementasi adalah serangkaian proses umum tindakan administraktif yang dapat diteliti pada tingkat progam tertentu. Proses implementasi akan dimulai apabila tujuan dan sasaran telah ditetapkan. Progam kegiatan telah tersusun dan dana telah siap serta telah disalurkan untuk mencapai sasaran (grindle, 1980:7 dalam akib dan tarigan, 2008:). Dalam menjalankan proses tindakannya membutuhkan dana untuk menyokong keberlanjutan dari progam yang diadakan. Dalam suatu progam bisa di implementasikan ketika tujuan dan sasaran sudah ditentukan dan didukung dengan adanya dana untuk kebutuhan dari progam.

Daniel Mazmanian dan Paul A.Sabatier dalam Nugroho (2014:214) menyatakan bahwa implementasi merupakan fungsi yang terdiri dari maksud dan tujuan, hasil dari sebuah pelayanan dan hasil sebagai akibat ataupun dampak. Implementasi itu sendiri terdiri dari implementor, formator, imitator dan time, penekanan utama pada implementasi ini adalah kebijakan itu sendiri, kemudian hasil yang dicapai dan dilaksanakan oleh implementor dalam kurun waktu tertentu. Peran dari implementor menjadi penting dan menjadi keharusan memeliki kompetensi yang baik untuk menjalankan suatu progam yang ada dalam melaksanakan implementasi kebijakan harus digabungkan dengan anggaran dasar atau mengambil bentuk keputusan eksekutif. Keputusan tersebut mengidentifikasi masalah yang dihadapi dengan menetapkan tujuan yang akan dicapai, sehingga aktifitas yang dilakukan dari hasil turunan dari progam hasil dari kebijakan tersebut terstruktur dan tersistematis serta tepat sasaran.

Menurut Van Meter dan Van Horn dalam Nugroho (2014:219), mengasumsikan model implementasi kebijakan bahwa implementasi kebijakan bekerja sejaan dengan proses kebijakan yang dikenal dengan implementasi kebijakan klasik. Iplementasi kebijakan inimemiliki variable yaitu: sumber daya dan tujuan standart, yang mendorong pada komunikasi antar organisasi, dan memiliki karakteristik badan-badan yang menginplementasikan yang dipengaruhi oleh kondisi sosial, ekonomi, dan politik. Sehingga dalam penginplementasian, kebijakan tersebut, harus memikirkan kekurangan dan kelebihan yang dimiliki oleh masyarakatnya yang nantinya tidak akan memberikan dampak negative pada kehidupan dan hubungan masyarakatnya.

Menurut undang-undang No.25 Tahun 2009 tentang pelayanan public, mendefinisikan pelayanan public merupakan kegiatan atau rangkaian dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga Negara dan penduduk atas barang, jasa, ataupun pelayanan administrative yang disediakan oleh penyelenggara public. Sementara itu istilah public berasal dari bahasa inggris public yang berarti umum, masyarakat, Negara. Kata public sebenarnya sudah diterima menjadi bahasa Indonesia baku menjadi public yang berarti umum orang banyak, ramai. Pandangan kata yang tepat digunakan adalah praja yang sebenarnya bermakna rakyat sehingga lahir istilah pekerja sosial yang berarti pemerintah yang melayani kepentingan seluruh rakyat (sinambela, 2011:5).

Sebagaimana telah dikemukakan pelayanan public itu merupakan pemberian layanan (melayani) kepentingan orang ataupun masyarakat yang berhubungan dengan sebuah organisasi dengan mengacu aturan pokok atau tata cara yang sudah ditetapkan. Pada hakekatnya pemerintah merupakan pelayanan bagi masyarakat, khususnya dalam bidang administrasi Negara. Sehingga dapat menciptakan kondisi dimana masyarakat dapat mengembangkan kemampuannya dan kreatifitasnya untuk mengatur dan menentukan masa depannya sendiri. Sehingga pelayanan yang diberikan oleh pemerintah tidak boleh diskrimininatif. Pelayanan yang diberikan tidak boleh memandang status ekonomi, golongan, pangkat dan masyarakat juga mempunyai hak yang sama dalam menerima pelayanan-pelayanan yang sesuai dengan peraturan yang sudah ditetapkan. Dengan adanya standart pelayanan ini dapat merubah kualitas pelayanan sosial,

dan juga memberikan pedoman pada aparatur sehingga layanan yang diberikan lebih sistematis dan efektif serta transparan proses pengerjakannya. Standart layanan itu sendiri merupakan ukuran yang dilakukan dalam penyelenggaraan pelayanan sosial yang wajib ditaati oleh pelaksana maupun penerima layanan. Standart layanan memiliki beberapa komponen dasar, setelah diklarifikasikan meliputi:

1. Prosedur Pelayanan

Prosedur Pelayanan yang dibakukan bagi pemberi dan penerima pelayanan termasuk persyaratan, system, mekanisme, dan pengaduan yang disiapkan untuk menghimpun respon masyarakat.

2. Waktu penyelesaian

Waktu penyelesaian yang di tetapkan sejak saat pengajuan permohonan sampai dengan penyelesaian pelayanan termasuk pengaduan.

3. Biaya pelayanan

Biaya atau tariff pelayanan termasuk rinciannya yang di tetapkan dalam proses pemberian layanan.

4. Program pelayanan

Hasil pelayanan yang akan diterima sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan. Termasuk juga adanya jaminan pelayanan yang di berikan sesuai dengan standart pelayanan.

5. Sarana dan prasarana

Penyediaan sarana dan prasarana pelayanan yang memadai oleh penyelenggara pelayanan publik. Fasilitas yang disediakan dalam proses layanan maupun pendukung layanan yang memberikan rasa nyaman pada penyelenggara maupun penerima.

6. Kompetensi petugas pelayanan

Kompetensi petugas pemberi pelayanan harus ditetapkan dengan tepat berdasarkan pengetahuan, keahlian, keterampilan, sikap, dan perilaku yang dibutuhkan.

Implementasi pelayanan publik pada dasarnya merupakan proses umum administratif yang berada dalam lataran pelayanan untuk memenuhi kebutuhan

masyarakat dengan kepuasan sebagai ukuran keberhasilannya. Pelayanan Sosial Lansia Terlantar Di Lingkungan Pondok Sosial merupakan pelayanan yang diberikan oleh pemerintah sebagai pelaksana untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Dalam hal ini proses pelayanan yang diberikan untuk mempermudah masyarakat dalam pelayanan lansia terlantar yang semakin meningkat.

2.2 Lansia (Lanjut Usia)

Setiap orang akan mengalami masa tua. Masa dimana menurunnya kemampuan fisik seseorang selain itu pada masa ini sering terserang penyakit. Masa tua yang bisa kita sering dengar dengan lansia atau lanjut usia. Menurut Departemen Sosial Republik Indonesia (2003:3) ada beberapa konsep lanjut usia. Secara individu, seorang disebut sebagai lanjut usia jika telah berumur 60 tahun keatas (di negara berkembang) atau 65 tahun keatas (di negara maju). Di antara lanjut usia yang berusia 60 tahun keatas dikelompokan lagi menjadi *young old* (60-69tahun), *old* (70-79tahun) dan *old-old* (80tahun keatas), mudah curiga, diliputi banyak kecemasan, insomnia atau tidak bisa tidur karena sangat bingung dan gelisah, dan lain-lain.

Adapun karakteristik yang bisa dilihat proses penuaan setiap lansia yang berbeda-beda. MenurutThomae (Monks,2006:334-335) menganggap proses tersebut terjadi sebagai interaksi antara perubahan-perubahan dalam sepuluh *subsystem* yang menyebabkan seorang lansia begitu berbeda antara yang satu dengan yanglain. Kesepuluh*subsystem* tersebut adalah:

- a. Permasalahan*nature-nurture*(permasalahan-pembelajaran) pada awal proses menjadi tua, misalnya karakteristik pembawaan, riwayat pendidikan, kebiasaan dalam aktivitas fisik dan mental, makanan, hobi, sertahubungan sosial.
- b. Perubahan dalam sistem biologis, misalnya kesehatan, biomorfosa atau proses penuaan yang primer, dan kemunduran dalam ingatan.
- c. Perubahan dalam peran sosial, misalnya lansia dipanti dan lansia yang tinggal di rumah memiliki perbedaan tersendiri, lansia yang kehilangan teman hidup, sahabat atau keluarga lain, lansia yang menjalin

- persahabatan baru dan memiliki peran sosial baru.
- d. Situasi sosio-ekonomis dan ekologis, misalnya hal-hal yang berkaitan dengan penghasilan, jaminan sosial, perumahan, kendaraan, jaminan pelayanan medis, dan aturan-aturan *preventif* atau pencegahan agar lansia tetap sehat atau mandiri.
- e. Konsistensi dan perubahan sifat-sifat kepribadian, misalnya dalam hal aktivitas, perhatian, suasanahati, kreativitas, penyesuaian, dan kontrol diri.
- f. Konsistensi dan perubahan berbagai macam aspek fungsi kognitif.
- g. Ruang hidup individual seperti konsep-diri, pengamatan terhadap orang lain, cara pandang terhadap situasi sosio-ekonomis, politik dan historis, orientasi nilai dan agama, sikap terhadap kematian dan keterbatasan kemampuannya.
- h. Kepuasan hidup atau keseimbangan (homeostatis) yang dicapai antara kebutuhan individual dan kondisi kehidupannya saat ini.
- Kemampuan untuk mengembalikan keseimbangan melalui konfrontasi atau perlawanan aktif dan sikap tidak menyerah serta penyesuaian tingkah laku.
- j. Kompeten sisosial sebagai tolak ukur kemampuan individu untuk memenuhi tuntutan sosial dan biologis. Disamping itu, diharapkan masyarakat juga dapat memenuhi kebutuhan dan mengembangkan kemampuan yang ada pada individu dalam hal ini lanjut usia.

2.3 Perlindungan Sosial

Perlindungan sosial merupakan elemen penting dalam kebijakan sosial untuk menurunkan tingkat kemiskinan serta memperkecil kesenjangan multidimensional (Suharto, 20011:16). Secara umum, perlindungan sosial merupakan sarana penting dengan tujuan meringankan dampak kemiskinan dan kemelaratan yang dihadapi oleh kelompok miskin beserta anak-anak mereka. Namun demikian, perlindungan sosial bukanlah satu-satunya pensekatan dalam strategi penanggulangan kemiskinan. Kemiskinan merupakan masalah yang

bersifat global yang menjadi masalah yang dihadapi dan menjadi banyak perhatian banyak orang di dunia (Suharto, 2009). Guna mencapai hasil yang efektif dan berkelanjutan, dalam pelaksanaanya strategi ini perlu dikombinasikan dengan pendekatan lain, seperti penyediaan pelayanan sosial, pendidikan dan kesehatan secara terintegrasi dengan pembangunan dan pertumbuhan ekonomi.

Sistem perlindungan sosial tradisional mampu tidak mampu menjadikan sandaran utama oleh kelompok miskin, kelompok orang tua terutama karena nilainilai kekeluargaan, sebagai pondasi jaringan pengamatan tradisional, mulai terkikis seiring dengan urbanisasi, industrialisasi, dan modernisasi (Suharo at el, 2006; Suharto, 2008c; Suharto, 2008d). Ketergantungan yang sangat tinggi terhadap sistem perlindungan sosial berbasis keluarga, serta kurangnya infrastuktur dalam progam jaminan sosial formal, telah menimbulkan kegagalan pemerintah di banyak Negara.

Dari sekian banyaknya kemiskinan di Indonesia menjadikan Negara ini sebagai salah satu Negara yang jumlah penduduknya hidup dalam kemiskinan, sementara itu yang masih menjadi masalah adalah Negara belum mampu memberikan perlindunagn sosial yang memadai bagi mereka sehingga berakibat pada masalah yang baru-baru ini terjadi yaitu terlantarnya lansia.

Perlindungan sosial dapat diartikan sebagai segala bentuk kebijakan dan intervensi publik yang dilakukan untuk merespon beragam resiko, kerentanan dan kesengsaraan, baik bersifat fisik maupun ekonomi, atau sosial (Soeharto, 2009:23). Tujuan utama dari perlindungan sosial adalah:

- Mencegah dan mengurangi resiko yang dialami manusia sehingga terhindar dari kesengsaraan yang parah dan berkepanjangan.
- Meningkatkan kemampuan kelompok-kelompok rentan dalam menghadapi dan keluar dari kemiskinan, kesengsaraan dan ketidakamanan sosialekonomi.
- 3. Memungkinkan kelompok-kelompok miskin untuk memiliki standar hidup yang bermartabat sehingga kemiskinan tidak diwariskan dari satu generasi ke generasi lain.

Berdasarkan konstitusi Indonesia pada Undang-Undang Dasar 1945 pada pembukaan dan pasal 27 dan 34, serta dalam Undang-Undang No.11/2009 tentang kesejahteraan sosial) menjamin bahwa Negara memberikan perlindungan sosial bagi seluruh warganya, lebih-lebih mereka yang terlantar dan miskin.

Namun demikian, jika dilihat dari kepesertaan perlindungan sosial formal yang mencakup jaminan sosial, ada sekitar 60 % penduduk Indonesia yang tidak tercakup oleh satu pun skema jaminan kesehatan, pensiunan, kecelakaan kerja, maupun kematian. Sebagian besar orang miskin diantara mereka hidup tanpa adanya perlindungan sosial serta pelayanan sosial yang layak.

Menurut Suharto (2009:42) Perlindungan sosial di bagi menjadi dua bagian yaitu perlindungan social Formal dan Non Formal. Di penelitian ini mengambil perlindungan sosial formal mengingat fokus kajian tentang lansia yang dalam pelayanannya mendapatkan jaminan sosial yaitu bantuan sosial yang diberikan UPT Lingkungan Pondok Sosial (LIPOSOS) Kabupaten Jember.

Jaminan Sosial menurut Soekamto, (2006:33) mencakup aspek hukum, aspek politik, dan aspek ekonomi. Aspek hukum jaminan sosial berkaitan dengan tanggung jawab Negara untuk melaksanakan Amanat Pasal 5 (2), Pasal 20, Pasal 28H (1), (2), (3), dan Pasal 34 (1) dan (2) UUD 1945 : yaitu sistem perlindungan dasar bagi masyarakat terhadap resiko-resiko sosial ekonomi. Aspek Politik Jaminan sosial adalah upaya pembentukan Negara kesejahteraan yang merupakan keinginan politik dan pemerintah. Dalam aspek ekonomi jaminan sosial terkait dengan retribusi pendapatan melalui mekanisme kepesertaan dan implementasi uji kebutuhan untuk keadilan, sistem jaminan sosial diperlukan untuk ketahanan Negara dan sekaligus peningkatan daya beli masyarakat agar terwujud keamanan ekonomi dalam jangka panjang.

Pengertian jaminan sosial menurut (Soekamtoand Thabrany 2006:34) pengertian jaminan sosial sangat beragam. Dilihat dari pendekatan asuransi sosial, maka berarti jaminan sosial sebagai teknik atau metode penanggungan resiko hubungan industrial yang berbasis pada hukum bilangan besar (*law of large numbers*). Dari sisi bantuan sosial, maka jaminan sosial berarti sebagai dukungan

pendapatan bagi komunitas kurang beruntung untuk keperluan konsumsi. Oleh karena itu, jaminan sosial berarti sebagai berikut:

- Salah satu faktor ekonomi seperti konsumsi, tabungan dan subsidi atau konsesi untuk retribusi pendapatan.
- b) Instrument Negara untuk retribusi resiko sosial-ekonomi melalui tes kebutuhan (*mean test-application*), yaitu tes apa yang telah dimiliki peserta baik berupa rekening tabungan maupun kekayaan riel.
- Program pengentasan kemiskinan yang ditindak lanjuti dengan pemberdayaan komunitas.
- d) Sistem perlindungan dasar untuk penanggulangan hilangnya sebagian pendapatan pekerja sebagai konsekwensi resiko industrial.

Jaminan sosial (*social security*) adalah sistem atau skema pemberian tunjangan yang menyangkut pemeliharaan penghasilan (income maintenance) (Suharto 2011:16). Di AS dan beberapa Negara Eropa seperti Prancis, Jaminan social umumnya menyangkut asuransi sosial (*social insurance*), yakni tunjangan uang yang diberikan kepada seseorang yang biasanya berupa pembayaran premi. Asuransi kesehatan, pensiunan, kecelakaan kerja, dan kematian adalah contoh asuransi sosial. Di Negara lainnya termasuk Indonesia biasanya diberikan kepada kelompok miskin tanpa mempertimbangkan kontribusinya. Anak terlantar, lansia terlantar, penyandang cacat yang tidak mampu bekerja biasanya merupakan sasaran utama bantuan sosial.

Menurut Suharto (2011:16) sebagai pelayanan sosial publik, jaminan sosial merupakan perangkat Negara yang didesain, untuk menjamin bahwa setiap orang sekurang-kurangnya memiliki pendapatan minimum yang cukup untuk memenuhi kebutuhan dasarnya. Jaminan sosial merupakan sektor kunci dari sistem Negara kesejahteraan berdasarkan prinsip bahwa Negara harus berusaha dan mampu menjamin adanya jaring pengaman pendapatan (financial safety net) atau pemeliharaan pendapatan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya.

Fungsi Jaminan Sosial memiliki tiga pilar yang terdiri dari:

1) Bantuan/pelayanan sosial. Sistem ini didanai sumber pajak oleh Negara atau sumbangan dari pihak mempunyai status ekonomi yang kuat.

- Tabungan Wajib. Setiap orang diwajibkan menabung untuk dirinya sendiri (Provident Fund) Sebagai mana dilaksanakan dalam jaminan hari tua Jamsostek.
- 3) Asuransi sosial. Dimana setiap orang berkontribusi atau membayar premi dan sifatnya wajib. Bisa juga premi/iuran dibayarkan oleh pihak lain atau oleh pemerintah, bagi mereka yang miskin. Sistem asuransi sosial ini paling baik, dana yang terkumpul memadai, tahan lama, dan paling banyak digunakan didunia.

Menurut UU NO.40 Tahun 2004 Bab 1, Pasal 1 jaminan sosial adalah salah satu bentuk perlindungan (*proteksi*) sosial, untuk menjamin seluruh rakyat agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya yang layak. Definisi lain (dalam Sulastomo, 2008:4-5) mengatakan "Jaminan sosial adalah suatu sistem yang memberikan jaminan pendapatan untuk mengenai resiko kehidupan, sakit, dan persalinan, kecelakaan kerja, pengangguran cacat, lanjut usia dan kematian, penyediaan perawatan medis dan penyediaan subsidi untuk keluarga dan anakanak".

Sedangkan pada UU No. 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial menjelaskan jaminan sosial adalah skema yang lembaga untuk menjamin seluruh rakyat agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya yang layak.Dalam penyelenggaraan program kesejahteraan sosial (Sulastomo, 2008: 11-12), selain program sosial terbuka berbagai pendekatan lain, sumber pembiayaan lain, yang menunjukan kemampuan ekonomi masyarakat untuk memikul beban iuran. *Pertama* ialah *Social Assistence* (Bantuan Sosial), yang diberikan Negara, sesuai dengan kemampuan Negara bagi masyarakat yang tidak mampu membayar iuran atau kelompok masyarakat tertentu. Misalnya bagi para lanjut usia yang memerlukan atau memiliki kerentanan sosial lainnya. Atau program aske bagi masyarakat miskin dan bantuanlangsung tunai yang sekarang kita kenal di Indonesia. Meskipun demikian, penyelenggaran jaminan sosial, antara lain untuk mewujudkan efesiensi, sebagaimana program kesehatan bagi masyarakat miskin (*Medicaid*). Kedua adalah pelayanan sosial dalam bentuk *social service* (Pelayanan Sosial). Negara memberikan jaminan sosial dalam bentuk pelayanan

yang dapat dinikmati warganya yang memerlukan. Misalnya bagi orang buta, cacat fisik atau mental, atau menderita suatu bencana.

Dari pengertian-pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa jaminan sosial adalah bentuk perlindungan sosial terhadap masyarakat dalam meningkatkan kesejahteraan warga Negara dan menjamin pemeliharaan pendapatan bagi mereka yang memiliki resiko kehidupan, seperti kecelakaan kerja, dan sebagianya serta memberikan bantuan terhadap mereka yang tidak memiliki pendapatan seperti, jompo terlantar, dan sebagiannya tanpa mempertimbangkan kontribusinya agar seluruh rakyatnya mampu memenuhi kebutuhan dasar hidupnya yang layak. Sebagaimana dinyatakan Thompson (2005:40) (dalam Suharto, 2011:16). "Dalam sebuah masyarakat yang beradab tidak boleh seseorangpun yang berada dalam posisi dimana mereka tidak mampu memenuhi kebutuhan dasarnya" (Suharto, 2011:16)".

Berdasarkan penjelasan diatas adalah setiap masyarakat harus dapat memenuhi kebutuhan dasarnya. Apabila ada manusia yang tidak dapat memenuhi ketubuhan dasar maka mereka akan mendapatkan perlindungan sosial guna memenuhi kebutahan mereka. Lansia Terlantar mendapat perlindungan sosial dari UPT Lingkungan Pondok Sosial (LIPOSOS) Kabupaten Jember, Dimana UPT tersebut memberikan kebutuhan-kebutuhan dasar yang dibutuhkan oleh Lansia terlantar.

2.4 Pelayanan Sosial

Pelayanan sosial merupakan sebuah aksi atau tindakan untuk mengatasi masalah sosial. Selain itu, juga dapat diartikan sebagai seperangkat program yang ditujukan untuk membantu individu atau kelompok yang mengalami hambatan dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Jika masalah ini dibiarkan, maka dapat menimbulkan masalah sosial seperti kemiskinan, keterlantaran, dan bahkan kriminalitas (Suharto, 2009 : 6).

Pelayanan sosial berkaitan dengan konsep Negara kesejahteraan (*welfare state*) yang merupakan sistem yang memberi peran kepada Negara untuk pro-aktif dan responsive dalam memberikan pelayanan sosial kepada warganya. Selain itu,

sebagai sebuah aktivitas yang terorganisasi, pelayanan sosial tidak dapat dipisahkan dengan pekerjaan sosial sebagai profesi kemanusiaan yang memiliki tugas utama memberikan atau mendistribusikan pelayanan sosial.

Secara historis, perkembangan pelayanan sosial tidak dapat dipisahkan dari berdirinya sistem Negara kesejahteraan (*welfare state*) khususnya di Negara eropa barat. sistem Negara kesejahteraan mengacu pada konsep dan sekaligus pendekatan yang menekankan pentingnya pemberian pelayanan sosial dasar bagi setiap warga Negara.

Bantuan sosial, atau yang kerap disebut juga sebagai bantuan publik (*public assistance*) dan pelayanan (*welfare service*) mencakup tunjangan uang, barang atau pelayanan sosial yang ditunjukan untuk membantu atau melindungi individu, keluarga dan komunitas yang paling rentan agar mereka mendapat memenuhi kebutuhan dasar dan meningkatkan kualitas hidupnya (Suharto, 2008).

Menurut Pasolong (2007:128), "Pelayanan pada dasarnya dapat didefinisikan sebagai aktifitas seseorang, kelompok atau organisasi baik langsung maupun tidak langsung untuk memenuhi kebutuhan". Sedangkan menurut Moenir (2008:16), "Pelayanan adalah proses pemenuhan kebutuhan melalui aktifitas orang lain secara langsung. Jadi dapat dikatakan bahwa pelayanan adalah merupakan serangkaian kegiatan guna memenuhi kebutuhan orang lain".

Menurut Undang-Undang No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik. Pelayanan publik merupakan kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik. Dalam hal ini, yang dimaksud penyelenggaran pelayanan publik adalah setiap institusi penyelenggara negara, lembaga independen yang dibentuk berdasarkan undang-undang untuk kegiatan pelayanan publik, dan badan hukum lain yang dibentuk semata-mata untuk kegiatan pelayanan publik.

Menurut Sinambela (2011:6), Tujuan pelayanan publik pada dasarnya adalah memuaskan masyarakat. Untuk mencapai kepuasan itu dituntut kualitas pelayanan prima yang tercermin dari:

- Transparansi, yakni pelayanan yang bersifat terbuka, mudah dan dapat diakses oleh semua pihak yang membutuhkan dan disediakan secara memadai serta mudah dimengerti.
- 2. Akuntabilitas, yakni pelayanan yang dapat dipertanggung jawabkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- Kondisional, yakni pelayanan yang sesuai dengan kondisi dan kemampuan pemberi dan penerima pelayanan dengan tetap berpegang pada prinsip efisiensi dan efektivitas.
- 4. Partisipatif, yaitu pelayanan yang dapat mendorong peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik dengan memperhatikan aspirasi, kebutuhan, dan harapan masyarakat.
- 5. Kesamaan hak, yaitu pelayanan yang tidak melakukan diskriminasi dilihat dari aspek apa pun khususnya suku, ras, agama, golongan, status sosial, dan lain-lain.
- 6. Keseimbangan hak dan kewajiban yaitu pelayanan yang mempertimbangkan aspek keadilan antara pemberi dan penerima pelayanan publik.

Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik, menjelaskan bahwa "Standar pelayanan adalah tolak ukur yang dipergunakan sebagai pedoman penyelenggaraan pelayanan dan acuan penilaian kualitas pelayanan sebagai kewajiban dan janji penyelenggara kepada masyarakat dalam rangka pelayanan yang berkualitas, cepat, mudah, terjangkau dan terukur".

Dalam Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara No. 63 Tahun 2003 Tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Pelayanan Publik, setiap penyelenggaraan pelayanan publik harus memiliki standar pelayanan dan dipublikasikan sebagai jaminan adanya kepastian bagi penerima pelayanan.

Standar pelayanan merupakan ukuran yang dibakukan dalam penyelenggaraan pelayanan publik yang wajib ditaati oleh pemberi dan atau penerima pelayanan. Standar pelayanan, sekurang-kurangnya meliputi :

1. Prosedur Pelayanan

Prosedur pelayanan yang dibakukan bagi pemberi dan penerima pelayanan termasuk pengaduan.

2. Waktu penyelesaian

Waktu penyelesaian yang ditetapkan sejak saat pengajuan permohonan sampai dengan penyelesaian pelayanan termasuk pengaduan.

3. Biaya pelayanan

Biaya/tarif pelayanan termasuk rinciannya yang ditetapkan dalam proses pemberian pelayanan.

4. Program pelayanan

Hasil pelayanan yang akan diterima sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan.

5. Sarana dan Prasarana

Penyediaan sarana dan prasarana pelayanan yang memadai oleh penyelenggara pelayanan publik.

6. Kompetensi petugas pemberi pelayanan

Kompetensi petugas pemberi pelayanan harus ditetapkan dengan tepat berdasarkan pengetahuan, keahlian, keterampilan, sikap, dan perilaku yang dibutuhkan.

Progam-progam bantuan sosial mencakup berbagai jenis tindakan publik yang didesain untuk mentransfer sumber-sumber kepada orang yang memenuhhi syarat, yakni mereka yang lemah dan rentan, seperti anak-anak, lansia, korban perang, korban bencana dan lain sebagainya. Mereka memiliki hak-hak sosial yang wajib di penuhi Negara terhadap ketidakmampuannya memberikan kontribusi premi. Bentuk-bentuk-bantuan sosial dapat berupa pelayanan sosial atau kesejahteraan yang berupa konseling, penyuluhan atau program, dan perluasan akses terhadap pelayanan kesehatan atau pendidikan.

Dalam memberikan bantuan kepada lansia terlantar lanjut usia melalui berbagai tahapan. Ada beberapa tahapan proses pelayanan Lansia TerlantarLiposos Kabupaten Jember (Sumber: Unit Pelayanan Teknis Lingkungan Pondok Sosial (LIPOSOS) Kabupaten Jember).

1. Tahap Pendekatan Awal

- a. Orientasi dan konsulatasi
- b. Identifikasi
- c. Motivasi
- d. Seleksi

2. Tahap Penerimaan (Pemanggilan)

- a. Pemanggilan dan penerimaan
- b. Bimbingan dan orientasi
- c. Pemahaman masalah
- 3. Tahap Bimbingan
 - a. Bimbingan fisik
 - b. Bimbingan mental
 - c. Bimbingan sosial
 - d. Bimbingan keterampilan
- 4. Tahap Terminasi dan Bimbingan Lanjut
 - a. Penyaluran / Terminasi
 - b. Bimbingan Lanjut

2.5 Keberfungsian Sosial

Setiap manusia ingin menjalankan peran dan fungsinya masing masing akan tetapi tidak semua manusia dapat menjalankan peran dan fungsinya masing masing. Permasalahan tersebut di atasi dengan cara menumbuhkan keberfungsian sosial. Menurut Huraerah (2005). KeberfungsianSosial adalah kemampuan seseorang dalam melaksanakan fungsi sosialnya atau kapasitas seseorang dalam menjalankan tugas- tugasnya kehidupannya sesuai dengan status sosial. Menurut Achlis (2011:21) keberfungsian sosial adalah kemampuan seseorang dalam melaksanakan tugas dan perannya selama berinteraksi dalam situasi sosial tertuntu yang bertujuan untuk mewujudkan nilai dirinya demi pencapaian kebutuhan hidup.Menurut Baker, Dobuis dan miley dalam Kementrian Sosial menyatakan

keberfungsian sosial berkaitan kemampuan seseorang dalam memenuhi kebutuhan dasarnya serta memberikan kontribusi positif bagi masyarakat.

Keberfungsian sosial mengacu pada cara yang dilakukan individuindividu atau kelompok dalam melaksanakan tugas kehidupan dan memenuhi kebutuhannya. Pendekatan keberfungsian sosial dapat menggambarkan kararakteristik dan dinamika kehidupan sosial yang lebih realisti dan komprehensif. Pendekatan ini juga menjelaskan bagaimana keluarga merespon dan mengatasi permasalahan sosial ekonomi masyarakat yang terkait dengan situasi lingkungan sekitarnya.

Peningkatan keberfungsian Sosial dapat terlihat melalui indikator-indikator keberfungsian Sosial. Menurut Achis (2011:21), Indikator-Indikator Peningkatan Keberfungsian Sosial adalah:

- Individu mampu melaksanakan tugas-tugas kehidupan, peranan dan fungsinya.
- 2. Individu intens menekuni hobi serta minatnya
- 3. Individu memiliki sifat afeksi pada dirinya dan orang lain atau lingkungannya
- 4. Individu menghargai dan menjaga persahabatan
- 5. Individu mempunyai daya kasih sayang yang besar serta mampu mendidik
- 6. Individu semakin bertanggung jawab terhadap tugas dan kewajibannya
- 7. Individu memperjuangkan tujuan hidupnya.
- 8. Individu belajar disiplin dan memanajemen diri
- 9. Individu memilih persepsi dan pemikiran yang realistik

Lansia merupakan seseorang yang sudah lanjut usia. Lansia sering kita lihat sudah tidak dapat menjalankan peran dan fungsinya lagi agar dapat menjalankan peran dan fungsinya lagi maka kita dapat menumbuhkan keberfungsian sosial kepada lansia.

2.6 Kajian Penelitian Terdahulu

Dalam penelitian perlunya sebuah kajian terhadap penelitian terdahulu yang sejenis, yang bertujian sebagai bahan refleksi untuk penelitian ini, penelitian

terdahulu juga berfungsi sebagai persamaan dan perbedaan. Kajian penelitian terdahulu merupakan acuan atau sebuah landasan dalam menjawab permasalahan dalam sebuah penelitian. Kajian penelitian terdahulu dapat diambil dari berbagai penelitian yang berhubungan dengan sistem kontrak kerja, meski terdapat sebuah perbedaan dalam sisi dimensi lokasi,objek, serta fokus pembahasan yang dapat dijadikan rujukan berpikir secara teoritik bagi penelitian ini.

Dalam Penelitian pertama, peneliti membandingkan dengan penelitian yang di lakukan oleh Dyah Rohmana (2014). Tentang Implementasi Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2012 Tentang Pedoman Pelayanan Sosial Lanjut Usia di Dinas Sosial Daerah Istimewah Yogyakarta Unit Lanjut Usia. Pada penelitian tersebut penelitian yang dilakukan merupakan penelitian lapangan (field research) pada dinas sosial daerah istimewah yogyakarta dan PSTW (Panti Sosial Tresna Werda) di Yogyakarta. Penelitian bertujuan menggambarkan dan menjelaskan secara sistematik, mengenai Implementasi Peraturan Menteri Sosial No. 19 Tahun 2012 Tentang Pedoman Pelayanan Sosial Lanjut Usia. Temuan yang di dapat oleh peneliti bahwa Implementasi peraturan tersebut di dinas sosial DIY sudah sesuai dengan Undangundang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945, UU No. 13 Tahun 1998 tentang kesejahteraan lanjut usia. Penerapan program pada pelayanan sosial untuk lansia dalam panti lancar, namun di luar panti belum sesuai dengan tujuan SOP, seperti terpenuhinya segala pelayanan sosial di dalam panti, adanya program pelayanan ASLUT (Asistensi Lanjut Usia), JSLU(Jaminan Sosial Lanjut Usia), UEP (Usaha Ekonomi Produktif) yang di berikan untuk lanjut usia terlantar atau kurang mampu. Persamaan pada penelitian ini adalah Sama-sama mengangkat fenomena terhadap Lansia Terlantar. Sedangkan perbedaannya dalam penelitian terdahulu yaitu peneliti melihat semua program pelayanan sosial terhadap lansia yang ada di Dinas Sosial DIY secara keseluruhan, sedangkan penelitian ini penelitian ini meneliti Implementasi Pelayanan Sosial Lansia Terlatar di Lingkungan Pondok Sosial (LIPOSOS) Kabupaten Jember.

Dalam penelitian kedua, peneliti membandingkan dengan penelitian yang di lakukan oleh Mohamad Fariz Rifqi (2016). Tentang pelayanan sosial Lanjut Usia

Terlantar di UPT Pelayanan Sosial Lanjut Usia kabupaten Banyuwangi. Pada penelitian tersebut peneliti berfokus pada program penanganan lanjut usia terlantar melalui UPT pelayanan sosial lanjut usia kabupaten banyuwangi, tahap pelayanan UPT Lanjut Usia Banyuwangi adalah persiapan,penerimaan Assesment, pelaksanaan dan terminasi. Tahapan tersebut dilaksanakan untuk menjamin kesejahteraan sosial lansia terlantar. Persamaan pada penelitian ini adalah sama-sama mengangkat fenomena Pelayanan Lansia Terlantar. Sedangkan perbedaan dalam penelitian terdahulu tentang pelayanan sosial yang diberikan merupakan pelayanan dalam panti, sedangkan penelitian ini meneliti Implementasi Program Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lansia Terlantar Kabupaten Jember.

Tabel 2.1 Kajian Penelitian Terdahulu

Sasaran Telaah	Penelitian yang ditelaah	
Penulis	Dyah Rohmana	Mohamad Fariz Rifqi
Judul Penelitian	"Implementasi Peraturan Menteri Sosial	"Pelayanan sosial Lanjut Usia
	Republik Indonesia Nomor 19 tahun	Terlantar di UPT Pelayanan
	2012 Tentang Pedoman Pelayanan Sosial	Sosial Lanjut Usia kabupaten
	Lanjut Usia di Dinas Sosial Daerah	Banyuwangi"
	Istimewah Yogyakarta Unit Lanjut Usia "	
Tahun	2014	2016
Penelitian		
Keluaran	Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga	Jurusan Ilmu Sosial dan Ilmu
lembaga		Politik Kesejahteraan Sosial,
		Universitas Jember.

Rumusan	1.Bagaimanakah Implementasi Peraturan	"Pelayanan Sosial apa saja
masalah	Menteri Sosial Republik Indonesia	yang di berikan UPT
	Nomor 19 Tahun 2012 tentang Pedoman	Pelayanan Sosial Lanjut Usia
	Pelayanan Sosial Lanjut Usia Di Dinas	Kabupaten Banyuwangi
	Sosial DIY Unit Lanjut Usia (lansia)?	kepada lansia terlantar?"
	2.Apa faktor pendukung dan penghambat	
	yang dihadapi pihak Dinas Sosial dalam	
	rangka penerapan mengenai Peraturan	
	Menteri Sosial Republik Indonesia	
	Nomor 19 Tahun 2012 tentang Pedoman	
	Pelayanan Sosial Lanjut Usia tersebut?	
Hasil Temuan	Peran pemerintah dalam hal	UPT Lanjut Usia Banyuwangi
	implementasi Peraturan Menteri Sosial	merupakan UPT yang menjadi
	Republik Indonesia Nomor 19 Tahun	naungan dari Pemerintah
	2012 Tentang Pedoman Pelayanan	Provinsi Jawa Timur dan dana
	Sosial Lanjut Usia Di Dinas Sosial	UPT Lanjut Usia Banyuwangi
	Daerah Istimewa Yogyakarta Unit Lanjut	itu berasal dari APBN
	Usia serta faktor-faktor yang mendukung	Provinsi. Dana tersebut
	serta mempersulit pemerintah dalam	digunakan UPT Lanjut Usia
	melaksanakan peraturan tersebut.	dalam memberikan program
		atau layanan kepada lansia.
		Setiap program atau layanan
		diperlukan tahapan dalam
		pelaksanannya.
Persamaan	Sama-sama mengangkat fenomena	Membahas tentang Lansia
penelitian	terhadap Lansia Terlantar	Terlantar
Perbedaan	Dalam penelitian Dyah Rohmana melihat	Tentang pelayanan sosial yang
penelitian	semua program pelayanan sosial terhadap	diberikan merupakan

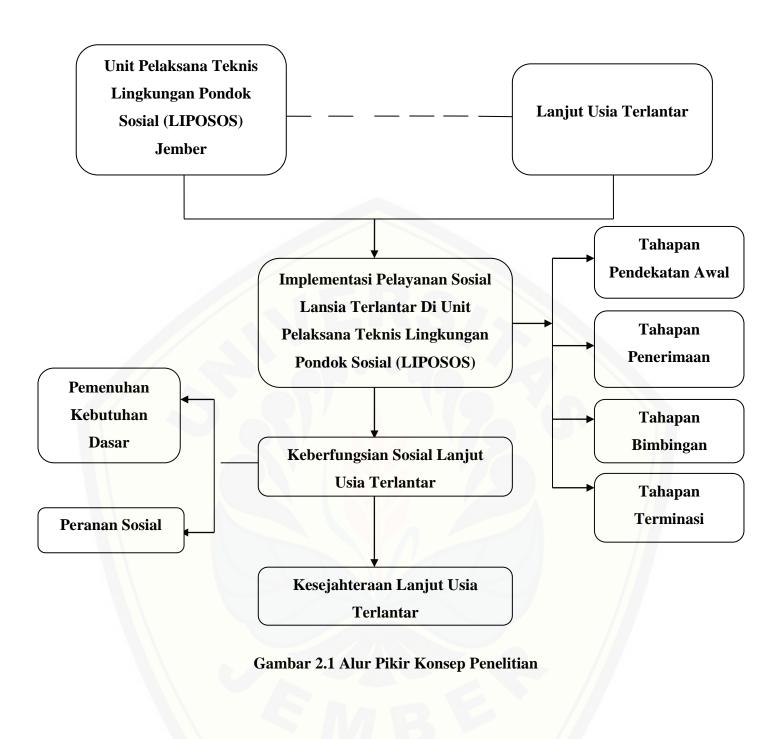
lansia yang ada di Dinas Sosial DIY secara keseluruhan. Sehingga peneliti berfokus kepada seluruh program pelayanan sosial. pelayanan dalam panti.

Sumber: Diolah berdasarkan penelusuran pustaka, 2016

2.7 Kerangka Berpikir

Kerangka berpikir ini menjelaskan terkait dengan fenomena yang akan diteliti. Alur penelitian ini juga menjelaskan arah penelitian sehingga nantinya dapat tergambar tujuan penelitian yang sesuai dengan fokus kajian. Sehingga memberikan suatu gambaran yang bertujuan untuk mendeskripsikan tentang implementasi pelayanan sosial lansia terlantar di lingkungan pondok sosial (LIPOSOS) Jember.

Menjadi tua adalah suatu hal yang pasti dan tidak bisa dielakkan oleh siapapun. Menua merupakan proses siklus dalam hidup. Pada saat masa-masa lanjut usia harapannya bisa merasakan kehidupan yang layak. Artinya seorang lansia hendaknya memperoleh pelayanan yang maksimal dengan kata lain seperti yang sering disebut "bahagia dihari tua". Sudah selayaknya para lanjut usia memperoleh kesejahteraan disaat masa tuanya. Meningkatnya jumlah penduduk lanjut usia membawa satu masalah yang harus ditangani keberadaanya dan harus ditanggapi serius oleh pemerintah dan pihak lainnya.



Digital Repository Universitas Jember

BAB 3. METODE PENELITIAN

Metode penelitian merupakan prosedur atau langkah-langkah sistematika dalam penulisan memecahkan suatu masalah sesuai dengan ketentuan yang ada. Metode penelitian memecahkan menjadi hal pokok yang harus ada, tentunya untuk mengungkapkan fakta-fakta yang ada menjaddi sebuah data sebagai bahan analisis dalam penelitian. Dengan menggunakan metode penilitian, diharapkan peniliti dapat mempermudah dalam memperoleh data yang dibutuhkan sesuai dengan permasalahan.

Menurut Sugiono (2008:2) "Metode penelitian yakni cara ilmiah untuk menapatkan sebuah data dengan tujuan dan kegunaan tertentu." Maka dari itu penggunaan metode dalam sebuah penelitian adalah prihal penting dan dasar untuk mengawali proses kegiatan penelitian yang telah dikonsepkan. Hal ini dilakukan untuk mempermuddah penelitian dalam menjelaskan fenomena dan permasalahan yang ada nantinya. Serta memperoleh data yang dibutuhkan oleh peneliti. Sehingga data yang diperoleh dalam penelitian dapat dirumuskan dan dianilisis untuk ditarik sebuah kesimpulan.

3.1 Pendekatan Dan Jenis Penelitian

Penelitian merupakan serangkaian kegiatan ilmian untuk memecahkan permasalahan. Pengertian metode penelitian menurut Sugiyono (2012;2) adalah cara ilmiah untuk mendapatkan data yang valid dengan tujuan dapat ditemukan, dibuktikan, dikembangkan suatu pengetahuan tertentu sehingga pada gilirannya dapat digunanakan untuk memahami, memecahkan dan mengantisipasi masalah.

Pendekatan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan pedekatan kualitatif dengan metode deskriptif yaitu suatu metode yang dapat digunakan untuk mempertanggung jawabkan keabsahan data yang diperoleh di lapangan. . Menurut Nazir (2004:54) Metode Deskriptif adalah penarikan fakta dengan interprestasi yang tepat. Penelitian ini menurutnya adalah dengan mempelajrai masalah-masalah dalam masyarakat, serta tata cara yang berlaku dalam

masyarakat serta situasi-situasi tertentu termasuk tentang hubungan kegiatan, sikap-sikap, pandangan-pandangan serta proses.

Berdasarkan latar belakang, jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian kualitatif. Definisi penelitian Kualitatif menurut Moleong (2010:6) adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian holistic, dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dan memnfaatkan berbagai metode ilmiah. Metode penelitian kualitatif deskriptif yang digunakan dalam penelitian ini bertujuan untuk memperoleh informasi mengenai Pelayanan Sosial Lansia Terlantar Di LIPOSOS Kabupaten Jember.

3.2 Penentuan lokasi penelitian

Dalam Penelitian langkah awal yang harus dilakukan adalah penentuan wilayah yang akan dijadikan lokasi penelitian. Penentuan lokasi penelitian merupakan hal yang sangat penting dimaksudkan untuk memperjelas fokus penelitian atau permasalahan yang kan diteliti.

Penelitian dilakukan di UPT Likungan Pondok Sosial (LIPOSOS) Kabupaten Jember. Pemilihan lokasi didasarkan pada fenomena masalah sosial yang masih banyak pada terlantarnya lansia di Kabupaten Jember, serta peneliti ingin mengetahui Pelayanan Sosial Lansia Terlantar apa saja yang ada di Lingkungan Pondok Sosial (LIPOSOS) Kabupaten Jember.

3.3 Teknik Penentuan Informan

Informan dalam penelitian mempunyai peranan yang sangat penting. Menurut Moleong (2010:132) menyatakan bahwa informan adalah orang yang dimanfaatkan untuk memberikan iniformasi tentang situasi dan kondisi latar belakang obyek penelitian

Teknik menentukan informan dalam penelitian dengan menggunakan *purposive* yaitu dengan cara menentukan informan atau narasumber yang dilakukan dengan sengaja atau pertimbangan tertentu (Sugiono, 2009:85). Hal ini dilakukan untuk mendapatkan data yang benar-benar dapat dipertanggung

jawabkan keabsahannya, karena dengan menggunakan metode penelitian kualitatif seorang peneliti cenderung melakukan penelitian dalam waktu yang tidak singkat untuk mendapatkan data yang cukup sehingga terus melakukan penggalian data atau informasi dari informan.

3.3.1 Informan Pokok

Menurut Sugiyono (2012:56) sebagai sumber utama atau informan pokok harus memenuhi beberapa kriteria, diantaranya adalah:

- a. Subyek yang menguasi atau memahami sesuatu melalui proses enkulturasi, sehingga sesuatu itu bukan sekedar diketahui tetapi juga dihayati.
- b. Subyek yang tergolong masih berkecimpung atau terlibat pada kegiatankegiatan yang telah diteliti.
- c. Subyek yang mempunyai waktu memadai untuk dimintai informasi.
- d. Subyek yang cenderung menyampaikan informasi hasil kemasanya sendiri.
- e. Subyek yang pada mulanya tergolong cukup asing dengan penelitian sehingga menggairahkan untuk dijadikan semacam guru atau narasumber.

Sehingga informan pokok yaitu mereka yang mengetahui dan memiliki berbagai informasi pokok yang diperlukan dalam penelitian. Informan pokok adalah mereka yang terlibat langsung dalam interaksi sosial yang diteliti. Dalam penelitian ini yang menjadi informan pokok adalah

- 1. Ketua UPT Lingkungan Pondok Sosial kabupaten jember
- 2. Kepala Bidang di Dinas Sosial Kabupaten Jember.
- 3. Pekerja sosial yang bekerja di UPT Likungan Pondok Sosial
- 4. Pekerja sosial medis yang menangani Lansia Terlantar

3.3.2 Informan Tambahan

Informan tambahan adalah mereka yang dapat memberikan informasi walaupun tidak langsung terlibat dalam pelayanan tersebut, sehingga mereka dianggap tahu tentang fenomena sosial yang terjadi di lapangan. Sehingga kriteria yang menjadi informan tambahan adalah lansia dengan kriteria sebagai berikut::

- 1. Terdata sejak 2015
- 2. Berada di UPT LIPOSOS selama minimal satu bulan
- 3. Bersedia menjadi informan.

Seperti yang telah disebutkan bahwa pemilihan informan pertama merupakan hal yang sangat utama sehingga harus dilakukan secara cermat, karena penelitian ini mengkaji tentang Lansia Terlantar UPT Lingkungan Pondok Sosial Kabupaten Jember terhadap lansia terlantar. Berikut deskripsi informan tambahan yang diperoleh.

Tabel 3.1 Informan Tambahan Lansia Terlantar UPT. LIPOSOS Jember

No.	Nama Informan	Jenis Kelamin dan Usia	Lama di Liposos
1.	Ibu Aminah	Perempuan (64 Tahun)	3 (bulan)
2.	Ibu Supiati	Perempuan (62 Tahun)	3 (bulan)
3.	Ibu Atik	Perempuan (65 Tahun)	4 (bulan)

3.4 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data. Tanpa mengetahui teknik pengumpulan data, maka peneliti tidak akan mendapatkan data yang memenuhi standar data yang di tetapkan. (Sugiyono,2012:62)

Pentingnya menggunakan teknik pengumpulan data adalah untuk memperoleh data yang diperlukan dalam pemecahan masalah dan akan mempengaruhi hasil dari proses penelitian yang dilakukan dilapangan, maka pada penelitian ini digunakan teknik pengumpulan data yang dianggap sesuai dan tepat antara lain:

3.4.1 Observasi

Dalam pengumpulan data hal yang pertama harus dilakukan oleh peneliti adalah melakukan observasi. Dalam melakukan Observasi peneliti dapat melakukananya dengan cara formal maupun informal. peneliti mengamati apa

yang diamatinya terhadap tempat terjadinya atau berlangsungnya peristiwa sehingga peneliti kemudian mengamati objek yang akan diteliti secara langsung maupun tidak langsung ketika berperistiwa itu berlangsung.

Dalam penelitian kualitatif terdapat beberapa teknik observasi yang harus digunakan agar dapat menegetahui latar belakang masalah yang diteliti, aktivitas-aktivitas yang berlangsung, orang- orang yang terlibat dalam kejadian yang akan diamati. Menurut Sugiyono (2012:64) mengklasifikasikan observasi menjadi observasi berpartisipasi (*participant observation*), observasi yang secara terangterangan dan tersamar (*overt observation* dan covert observation), dan observasi yang tak berstruktur (*unstructured observation*).

1) Observasi partisipasif

Dalam observasi ini, peneliti terlibat dengan kegiatan seharihari orang yang sedang diamati atau yang digunakan sebagai sumber data penelitian. Sambil melakukan pengamatan, peneliti ikut melakukan apa yang dikerjakan oleh sumber data, dan ikut merasakan suka dukanya. Dengan observasi partisipan ini, maka data yang diperoleh akan lebih lengkap, tajam, dan sampai mengetahui pada tingkat makna dari setiap perilaku yang nampak. Observasi ini dapat digolongkan menjadi empat, yaitu partisipasi pasif, partisipasi moderat, observasi aktif, dan observasi yang lengkap.

2) Observasi terus terang atau tersamar

Dalam hal ini, peneliti dalam melakukan pengumpulan data menyatakan terus terang kepada sumber data, bahwa ia sedang melakukan penelitian. Jadi mereka yang diteliti mengetahui sejak awal sampai akhir tentang aktivitas peneliti. tetapi dalam suatu saat peneliti juga tidak terus terang atau tersamar dalam observasi, hal ini untuk menghindari kalau suatu data yang dicari merupakan data yang masih dirahasiakan. Kemungkinan kalau dilakukan dengan terus terang, maka peneliti tidak akan diijinkan untuk melakukan observasi.

3)Observasi tak berstruktur

Observasi tidak terstruktur adalah observasi yang tidak dipersiapkan secara sistematis tentang apa yang akan diobservasi. Hal ini dilakukan karena peneliti tidak tahu secara pasti tentang apa yang akan diamati. Dalam melakukan pengamatan peneliti tidak menggunakan instrumen yang telah baku, tetapi hanya berupa ramburambu pengamatan.

Berdasarkan teknik observasi diatas, maka penelitian tentang "Implementasi Pelayanan Sosial Lansia Terlantar Di LIPOSOS Kabupaten Jember". akan memakai teknik observasi partisipatif pasif dimana peneliti melakukan observasi secara langsung dengan melakukan pengamatan namun tidak ikut terlibat dalam kegiatan. Peneliti mengamati aktivitas yang dilakukan dan berkomunikasi dengan informan dengan melakukan observasi secara langsung terhadap objek penelitian dengan mengamati apa yang dikerjakan, mendengarkan apa yang diucapkan.

Observasi dilakukan dengan sengaja pada saat informan senggang atau dalam keadaan santai tanpa tekanan yaitu informan istirahat atau selesai bekerja. Hal ini dilakukan peneliti baik kepada informan pokok maupun informan tambahan dengan melakukan kesepakatan terlebih dahulu, sehingga waktu dan tempatnya disepakati bersama. Secara garis besar dapat dijelaskan mengenai situasi sosial yang terjadi dalam kegiatan informal di UPT Ligkungan Pondok Sosial LIPOSOS Kabupaten Jember.

3.4.2 Wawancara

Dalam pengumpulan data selain menggunakan cara observasi dalam penelitian kualitatif dapat memperoleh sebuah data juga dapat menggunakan tehnik wawancara. Menurut Moloeng (2010:135) Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu. Percakapan ini dilakukan oleh dua pihak yaitu pewawancara yang menyajikan pertanyaan dan yang diwawancarai yang memberikan jawaban atas pertanyaan.Pada penelitian ini digunakan dua teknik wawancara yaitu:

1) Wawancara terbuka

Wawancara terbuka dilakukan secara terbuka dan penuh kekeluargaan. Dalam pelaksanaan wawancara ini peneliti menemui langsung informan sesuai dengan waktu dan lokasi yang telah disepakati. Untuk memperoleh data yang sesuai dengan pokok permasalahan yang di ajukan, maka dalam wawancara digunakan pedoman pertanyaan agar memperoleh informasi yang bersifat umum.

2) Wawancara mendalam

Wawancara mendalam dilakukan dalam konteks observasi partisipasi. Penelitis secara intensif terlibat dengan informan secara mendalam. Dalam Satori (2012:130) menjelaskan definisi wawancara secara mendalam sebagai berikut:

"Wawancara yang mendalam adalah tanya jawab yang terbuka untuk memperoleh data tentang maksud hati partisipan-bagaimana menggambarkan dunia mereka dan bagaimana mereka menjelaskan atau menyatakan perasaannya tentang kejadian-kejadian penting dalam hidupnya."

Pada penelitian ini peneliti menggunakan teknik wawancara secara mendalam (*In Depth Interview*) sehingga wawancara yang dilakukan oleh peneliti dengan mengembangkan pertanyaan pertanyaan kepada informan. Namun memberikan keleluasaan kepada informan dalam memberikan informasi. Biasanya wawancara ini digunakan bersamaan dengan metode observasi partisipasi pasif . wawancara mendalam dilakukan berkali-kali dan membutuhkan waktu yang lama bersama informan dilokasi penelitian, hal mana kondisi ini tidak pernah terjadi pada wawancara pada umumnya.

Ada beberapa jenis wawancara yang dikemukakan Sugiyono (2012:73) yaitu wawancara terstruktur, semiterstruktur, dan tidak terstruktur.

1) Wawancara terstruktur (*Structured Interview*)

Wawancara terstruktur digunakan sebagai teknik pengumpulan data, bila peneliti atau pengumpul data telah mengetahui dengan pasti tentang informasi apa yang akan diperoleh. Oleh karena itu dalam melakukan wawancara, pengumpul data telah menyiapkan instrumen penelitian berupa pertanyaan-pertanyaan tertulis yang alternatif jawabannya pun telah disiapkan.

2) Wawancara semistruktur (Semistructure Interview)

Tujuan dari wawancara jenis ini adalah untuk menemukan permasalahan secara lebih terbuka, di mana pihak yang diajak wawancara diminta pendapat, dan ide-idenya.dalam melakukan wawancara, peneliti perlu mendengarkan secara teliti dan mencatat apa yang dikemukakan oleh informan.

3) Wawancara tak terstruktur (*Unstructured Interview*)

Wawancara tidak terstruktur, adalah wawancara yang bebas di mana peneliti tidak menggunakan pedoman wawancara yang telah tersusun secara sistematis dan lengkap untuk pengumpulan datanya.

Peneliti ini menggunakan jenis wawancara tak terstruktur dimana memberi peluang kepada peneliti untuk mengembangkan pertanyaan bagi informan. Proses wawancara ini bisa dilakukan pada dua tempat yaitu di kantor UPT Lingkungan Pondok Sosial dan Kantor Dinas Sosial Kabupaten Jember. Dalam pelaksanaan wawancara ini, selain bertanya peneliti juga sekaligus melakukan pengecekan informasi dari informan satu dengan informan lainnya, serta mengecek dari hasil pengamatan. Pada saat melakukan wawancara, peneliti menggunakan alat perekam berupa *mobile phone*.

3.4.3 Dokumentasi

Dokumentasi disini berupa buku-buku yang ada hubungannya dengan maslah yang diteliti, jurnal, bulletin, majalah ilmiah, laporan penelitian, dokumen pribadi dan dokumen resmi. Dokumentasi merupakan suatu bahan tertulis atau film yang dipersiapkan karena permintaan seorang peneliti (Moleong, 2010:161).

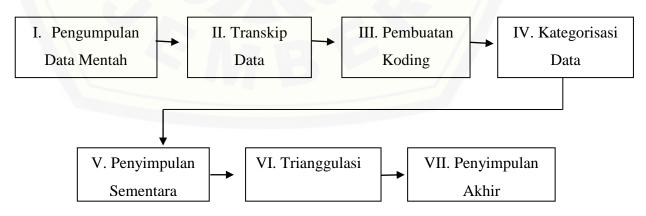
Dalam penelitian ini menggunakan tehnik penelitian dengan menggunakan dokumentasi. "Dokumentasi adalah suatu bahan tertulis atau film yang

dipersiapkan karena permintaan seorang peneliti" (Moleong, 2010:161). Peneliti menggunakan metode ini adalah untuk memperoleh data yang menunjang terhadap permasalahan yang diajukan, dengan cara membaca beberapa sumber masukan dan mengutip suatu dokumen atau catatan yang sudah ada yaitu untuk mendapatkan data monografi, demografi dan data lainnya yang dianggap perlu untuk penyempurnaan penelitian ini.

Metode ini digunakan oleh peneliti dengan cara mengumpulkan, mengelolah, serta menyimpan data dengan cara menyimpan hasil penelitian sebagai sebuah dokumen seperti gambar, kutipan, guntingan koran atau referensi lain seperti buku administrasi lansia terlantar.

3.5 Analisis data

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis data secara kualitatif, yaitu segala sesuatu yang dianyatakan oleh informan baik secara tertulis maupun lisan serta perilaku nyata yang dipelajari dan diteliti sebagai sesuatu yang utuh. Dalam penggunaan teknik analisis kualitatif dalam penelitian adalah cara membahas pokok permasalahan berdasarkan data mentah yang diperoleh baik studi kepustakaan maupun dari hasil penelitian lapangan yang kemudian dianalisa secara kualitatif untuk pemecahan. Analisis ini dilakukan bersamaan proses data. Ada banyak carauntuk memproses data agar terdapat nilai validitas antaralain adalah transkip data. Jadi hasil dan wawancara yang dilakukan oleh penulis diubah menjadi tulisan verbatif, setelah itu penulis melakukan pembuatan koding dari transkip yang telah dibuat.



Gambar 3. 1 Metode Analisis Data (Sumber: Irawan, 2006)

Menurut Irawan (2006:76- 80) tahapan yang dapat dilakukan pada waktu melakukan analisis data yaitu :

1. Pengumpulan data mentah

Pada pengumpulan data ini dapat diperoleh melalui wawancara, observasi dan studi dokumentasi. Pada tahap ini akan digunakan alat bantu perekam dan alat bantu lainya yang diperlukan. Penelitian dilakukan mencatat apa adanya (*verbatim*) dengan tidak mencampuradukan antara pikiran, kometar dan sikap peneliti.

2. Transkip data

Catatan yang telah terkumpul baik berasal dari alat perekam atau tulisan tangan akan diubah mejadi bentuk tertulis. Kemudian akan diketik sama persis seperti apa adanya (*verbatim*), dengan tidak mencampuradukan dengan pendapat dan pemikiran penulis. Dalam transkip data dan selembar kertas hanyadigunakan duapertiga saja dari lebar kertas. Sepertiganya akan digunakan untuk urusan koding data.

3. Pembuatan Koding

Seluruh data yang telah ditranskip akan dibaca ulang dengan perlahan dan sangat teliti. Pada bagian-bagian tertentu apabila ditemukan hal- hal penting akan dicatat untuk proses selanjutnya. Dari hal-hal penting ini akan diambil "kata kuncinnya", dan kata kunci ini nanti akan diberi kode.

4. Kategorisasi data

Pada tahap ini akan dimuali proses penyederhanaan data dengan cara "mengikat" konsep-konsep dan besaran yang dinamakan "kategori". Jadi dari misalnya 65 kata kunci, peneliti mungkin akan merangkumnya menjadi misalnya 12 kategori.

5. Penyimpulan sementara

Pengambilan kesimpulan sementara 100% harus berdasarkandata dan tidak dicampuradukan antara pikiran dan penafsiran peneliti. Jika ingiin membuat penafsiran dan penelitian, maka ditulis pada bagian akhir kesimpulan sementara. Metode ini disebut dengan *Observer's Comment (OC)*.

6. Trianggulasi

Merupakan proses *check* dan *recheck* antara satu sumber data dengan sumber data lainya. dalam proses ini beberapa kemungkinan bisa terjadi. Pertama, satu sumber cocok (koheren senada) dengan sumber lain. Kedua satu sumber data berbeda dari sumber lain, tetapi tidak harus berarti bertentangan ketiga, satu sumber 180 derajat bertolak belakang dengan sumber lain.

7. Penyimpulan akhir

Kesimpulan penelitian kualitatif berbentuk deskriptif kualitatif yang merupakan kristalisasi dan konseptualisasi dari temuan di lapangan.

3.6 Teknik Keabsahan Data

Dalam pelaksanaan penelitian suatu kesalahan dimungkinkan dapat timbul dari diri peneliti ataupun dari pihak informan. Maka dari itu untuk mengurangi danmengantisipasi kesalahan data tersebut peneliti megadakan pengecekan kembali data tersebut sebelum diproses dalam bentuk laporan dengan ahrapan laporan yang disajikan nanti tidak mengalami kesalahan.

Banyak penelitian kualitatif sering diragukan kebenarannya hal tersebut menimbulkan pertanyaan tentang keilmiahan penelitian kualitatif. Pada dasarnya di dalam penelitian kualitatif sudah ada meningkatkan derajat kepercayaan data yang dinamakan keabsahan data. Menurut Moleong (2010:320) adalah setiap keadaan harus memenuhi:

- 1. Mendemonstrasikan nilai yang benar
- 2. Menyediakan dasar agar hal itu dapat diterapkan, dan
- 3. Memperbolehkan keputusan luar yang dapat dibuat tentang konsistensi dari prosedurnya dan kenetralan dari temuan dan keputusan-keputusannya.

Teknik keabsahan data diperlukan untuk menguji pengukur keabsahan data untuk meningkatkan kepercayaan data oleh peneliti. Keabsahaan data di kontrol dengan metode Triagulasi data. Menurut Moleong (2010: 330-331) bahwa "Trianggulasi dengan sumber dalah mengecek balik derajat kepercayaan suatu informasi yang diperoleh melalui waktu dan alat yang berbeda dalam penelitian kualitatif.

Menurut Moleong (2006:330-331) membedakan tiga macam triangulasi sebagai teknik pemeriksaan,yaitu:

- 1. Triangulasi dengan sumber berarti membandingkan dan mengecek kembali derajat kepercayaan suatu informasi yang diperoleh melalui waktu dan alat yang ada dalam penelitian kualitatif. Menurut dalam Moleong (2010:330) Hal tersebut dapat dicapai dengan jalan: membandingkan data hasil pengataman dengan data hasil wawancara, membandingkan apa yang dikatakan orang di depan umum dengan apa yang dikatakannya secara pribadi, membandingkan apa yang dikatkan orang orang tentang situasi penelitian dengan apa yang dikatakannya sepanjang waktu, membandingkan keadaan dan perspektif seseorang dengan berbagai pendapat dan pandangan orang seperti rakyat biasa, atau berpendidikan menengah orang yang tinggi, pemerintahan serta membangdingkan hasil wawancara dengan isi dokumen yang berkaitan.
- 2. Pada triangulasi dengan metode. Menurut Moleong (2010:331) hal tesebut dapat dicapai dengan melakukan pengecekan derajat kepercayaan penemuan hasil penelitian dengan beberapa teknik pengumpulan data serta pengecekan derajat kepercayaan beberapa sumber data dengan metode yang sama.
- 3. Triangulasi dengan teori, menurut Moleong (2010:331), berdasarkan anggapan bahwa fakta tidak dapat diperiksa derajat kepercayaannya dengan satu atau lebih teori. Dalam hal ini jika di analisis telah menguraikanpola, hubungan, dan menyertakan penjelasan yang muncul dari analisis maka penting sekali untuk mencari tema atau penjelasan pembanding.

Triangulasi adalah cara terbaik untuk menghilangkan perbedaan perbedaan kontruksi kenyataan yang ada di dalam konteks studi sewaktu mengumpulkan data tentang berbagai kejadian dan hubungan dari berbagai pandangan. Dengankatalain bahwa dengantriangulasi, penelitidapat me-recheck

temuan dengan jalan membandingkannya dengan berbagai sumber.

Pada penelitian ini menggunakan teknik triagulasi sumber data. Teknik triagulasi sumber data. Teknik triagulasi sumber digunakan peneliti untuk memadukan antara hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi. Setelah mendapatkan informasi atau data dari informan. Peneliti langsung melakukan pengecakan kepada informan lain sebagai pembanding.



Digital Repository Universitas Jember

BAB 5. PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Pelayanan sosial yang dilakukan oleh Unit Pelaksana Teknis Lingkungan Pondok Sosial (LIPOSOS) Jember merupakan bentuk pelayanan sosial yang diperuntukkan untuk lanjut usia terlantar. Hal ini didasarkan atas kenyataan di lapangan bahwa masih banyak sekali lanjut usia yang terlantar dan seharusnya pada usia mereka, mereka bisa berkumpul dengan keluarga dan menikmati hari tuanya. Hal itu dilatar belakangi oleh mulai pudarnya norma-norma akan menghormati orang tua atau lanjut usia. Dengan adanya kebijakan dari pemerintah dan pelaksanaan yang memungkinkan, maka pelayanan sosial demikian dapat membantu lanjut usia terlantar untuk kesejahteraan.

Merujuk pada masalah dan kebutuhan yang dihadapi lansia yang telah dipaparkan sebelumnya, lansia memerlukan pelayanan yang terkait dengan masalah dan kebutuhan mereka, meliputi: pelayanan dasar, pelayanan kesehatan, pelayanan yang terkait dengan kondisi sosial, emosional, psikologis. Upaya pelayanan sosial di Unit Pelaksana Teknis Lingkungan Pondok Sosial (LIPOSOS) Jember sangat membantu para penduduk lanjut usia terlantar untuk meningkatkan kualitas hidup, kesejahteraan, dan terpenuhinya kebutuhan dasar lanjut usia. Adapun Tahapan yang diberikan oleh lembaga sosial, meliputi:

- 1) Tahapan Pendekatan Awal
- 2) Tahapan Penerimaan
- 3) Tahapan Bimbingan
- 4) Tahapan Terminasi

Tahap Pendekatan Awal memiliki bentuk pelayanan adalah yang pertama berupa penyiapan rencana-rencana program yang akan diberikan kepada masyarakat setelah itu mencari dukungan dari pemerintah pusat, daerah, kecamatan, dan desa yang nantinya akan membantu mereka dalam memberikan layanan kepada masyarakat dan memberikan sosialisasi kepada masyarakat sekitar tentang layanan atau rencana yang akan diberikan kepada masyarakat.

Tahap Penerimaan Pada tahap ini biasanya lembaga akan menerima klien yang akan diberikan pelayanan.lansia yang berada di UPT Lingkungan Pondok Sosial (LIPOSOS) Kabupaten Jember berasal dari lingkungan sekitar. Dimana lansia tersebut tertangkap oleh satpol PP yang kemudian dibawa ke UPT Lingkungan Pondok Sosial (LIPOSOS) Kabupaten Jember yang tertangkap oleh satpol PP merupakan Lansia yang tidur dijalan atau di depan toko akan tetapi lansia yang dibawa ke UPT Lingkungan Pondok Sosial (LIPOSOS) Kabupaten Jember tidak semua diterima karena harus di lengkapi persyaratannya.

Tahap Bimbingan ini dilakukan pada tahap dasarnya pemeriksaan kesehatan secara rutin yaitu setiap hari. Lansia di kumpulkan di depan kamar saat setelah dimandikan, biasanya yang selalu digunakan untuk pemeriksaan rutin tersebut. Pemeriksaan rutin ini meliputi pengecekan gula darah, tensi darah, dan keluhan-keluhan ringan lainnya. Namun, apabila terdapat lansia yang mengalami gaangguan kesehatan yang masih dapat disembuhkan dengan memberikan obatobatan maka pihak Peksos medis akan memberikan obat-obatan tersebut sesuai kebutuhan.

Tahap Terminasi Tahapan ini merupakan tumpahan pemutusan hubungan secara formal dengan komunitas sasaran, karena di pandang komunitas tersebut sudah mandiri dan berhasil memecahkan masalahnya atau batas waktu yang di tentukan sudah selesai serta bisa dimungkinkan karena keterbatasan dana. Tahap terminasi yang dilakukan oleh UPT Lingkungan Pondok Sosial (LIPOSOS) Kabupaten Jember berupa Tahap Penyaluran Dan Bimbingan Lanjut Usia. Pada tahap ini merupakan tahap dimana Klien sudah tidak ada di lembaga tersebut.

Merujuk pada masalah dan kebutuhan yang dihadapi lansia yang telah dipaparkan sebelumnya, lansia memerlukan pelayanan yang terkait dengan masalah dan kebutuhan mereka, meliputi: pelayanan dasar, pelayanan kesehatan, pelayanan yang terkait dengan kondisi sosial, emosional, dan psikologis. Upaya pelayanan sosial di Unit Pelaksana Lingkungan Pondok Sosial Liposos Jember sangat membantu para penduduk lanjut usia terlantar untuk meningkatkan kualitas hidup, kesejahteraan, dan terpenuhinya kebutuhan dasar lanjut usia. Adapun jenis pelayanan yang diberikan oleh lembaga sosial, meliputi:

- 1) bimbingan fisik yang didalamnya memiliki bentuk pelayanan seperti pemberian tempat tinggal yang layak, pemenuhaan jaminan hidup terhadap kebutuhan pokok, pemeliharaan kesehatan, dan pengurusan pemakaman;
- 2) bimbingan sosial yang dilakukan bentuk pelayanan berupa pemberiaan konseling dan motivasi.

Keberadaan penduduk lansia terlantar mencerminkan bahwa keluarga sebagai lingkungan terdekat para lansia tidak dapat memberikan dukungan sosial dengan baik. Terdapat beberapa alasan keluarga tidak dapat memberi dukungan sosial bagi lansia, diantaranya adalah: 1) kemiskinan, keluarga tidak dapat memberikan dukungan instrumental karena mereka miskin sehingga tidak mampu memberikan kebutuhan dasar pada anggota keluarganya yang sudah lansia; 2) nilai-nilai kekeluargaan sudah mulai melemah, lansia dianggap sebagai beban keluarga, keluarga cenderung memperhatikan keluarga intinya tanpa memperhatikan kebutuhan keluarga besarnya; 3) kesibukan karena bekerja, anakanak memiliki pekerjaan yang menuntut curahan waktu yang banyak, sehingga mereka tidak memiliki waktu yang cukup untuk merawat orangtua; 4) tidak mampu merawat, banyak diantara keluarga yang tidak memiliki kemampuan untuk merawat karena lansia di keluarganya memerlukan perawatan khusus. Tiga alasan terakhir yang menyebabkan lansia terlantar, tidak hanya dapat terjadi pada keluarga miskin tetapi juga dapat terjadi pada keluarga kalangan menengah ke atas, dimana terdapat lansia yang tidak terlantar secara ekonomi tetapi terlantar secara psikis dan sosial.

pemenuhan tempat tinggal yang layak diwujudkan dengan membangun Lingkungan Pondok Sosial Liposos Kabupaten Jember sarana dan prasarana yang bersih, sehat, aman, nyaman, dan memiliki akses yang mudah, dan tidak tergantung pada orang lain. Kemudian bentuk pelayanan pada pemenuhan jaminan hidup berupa kebutuhan pokok dan pemeliharaan kesehatan diwujudkan dengan menyediakan obat-obatan ringan, pemeriksaan kesehatan rutin setiap minggunya, dan pemberian pakaian yang bersih dan layak pakai serta pemenuhan makanan yang sehat dan bergizi. Bentuk pelayanan yang terakhir berupa pengurusan pemakaman bagi lanjut usia dengan menyediakan lahan pemakaman

apabila lanjut usia tidak memiliki keluarga dan dikembalikan kepada sanak saudara apabila memiliki keluarga yang mau mengurus.

Pelayanan sosial yang dilakukan oleh Unit Pelaksana Teknis Lingkungan Pondok Sosial (LIPOSOS) Jember merupakan bagian dari pelayanan sosial dalam memenuhi kesejahteraan sosial bagi lanjut usia terlantar. Upaya yang dilakukan oleh Unit Pelaksana Teknis Lingkungan Pondok Sosial Jember dalam mewujudkan kesejahteraan lanjut usia terlantar dilakukan dengan memberikan pelayanan yang bersifat kemanusiaan guna menacapai kondisi sejahtera dalam memenuhi kebutuhan dan menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang dialami lanjut usia terlantar. Bentuk pelayanan tersebut tentunya ditujukan untuk mencapai kesejahteraan lanjut usia terlantar.

5.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas untuk memperbaikan pelayanan sosial kepada Lansia Terlantar di UPT Lingkungan Pondok Sosial (LIPOSOS) Kabupaten Jember berikut beberapa saran :

- 1. Pelayanan yang dilakukan oleh Unit Pelaksana Teknis Lingkungan Pondok Sosial (LIPOSOS) Jember dalam mengatasi kejenuhan dengan cara mempertemukan dengan keluarga dan mengikut sertakan keluargnya dalam kegiatan, diharapkan dalam kegiatan yang diberikan untuk membantu lansia dalam mengtasi kejenuhan salah satunyaa melepaskan rindu kepada keluarga dan segera di pulangkan ke keluarganya. Pihak Unit Pelaksana Teknis Lingkungan Pondok Sosial Jember dapat menjadi mediator antara keluarga dengan orang tuanya agar tidak akan pernah terjadi kurangnya perhatian terhadap Ibu atau Bapaknya. dalam bentuk kegiatan yang dibentuk bersamasama. Kegiatan ini dilakukan sekaligus dapat menjadi bagian dari proses intervensi yang akan diberikan oleh pihak Unit Pelaksana Teknis Lingkungan Pondok Sosial (LIPOSOS) Kabupaten Jember.
- 2. Penambahan pekerja sosial yang mempunyai latar belakang ilmu kesejahteraan sosial. Penambahan pekerja sosial di lingkungan pondok sosial

(LIPOSOS) dirasa perlu, bukan pekerja sosial dirasa kurang akan tetapi pekerja sosial yang berlatar belakang ilmu kesejahteraan sosial belum ada.



DAFTAR PUSTAKA

- Achlis. 2011. Praktek Pekerja Sosial. Bandung: STKS
- Adi, I.R. 2002. *Pemikiran-pemikiran dalam pembangunan Kesejahteraan Sosial*. Jakarta: Lembaga Penerbit FE-UI.
- Amartya, S. 1999. *Development as Freedom*. New York: Oxford University Press. *dan nenek*. Bandung: CV. Mandar Maju
- Dinas Sosial Provinsi Jawa Timur. 2009. Panduan Program Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS).
- Dinas Sosial. 2015. Profil Dinas Sosial Kabupaten Jember. Jember: Dinas Sosial
- Hidayat, A. Aziz Alimul. 2012. Pengantar Kebutuhan Dasar Manusia (Aplikasi
- Huda, Miftahul. 2009. *Pekerjaan Sosial dan Kesejahteraan Sosial: Sebuah Pengantar*. Yogyakarta : Pustaka Belajar
- Huraerah, Abu. 2005. "Pekerja Sosial Dalam Mengenai Kemiskinan". Jakarta : Pikiran Rakyat
- Hurlock, E. B. 2006. Psikologi Perkembangan: Suatu Pendekatan Sepanjang Rentang Kehidupan. Jakarta: Erlangga
- Indriana, Y. 2012. Gerontologi dan Progeria. Yogyakarta: Pustaka Belajar
- Irawan, P. 2006. Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif untuk Ilmu-ilmu Sosial.
- Jahja, Yudrik. 2011. *Psikologi Perkembangan*. Jakarta: Kencana Jakarta: Departemen Ilmu Administrasi FISIP UI.
 - Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Kartono, Kartini. 2007. Psikologi Wanita (jilid 2) mengenal wanita sebagai ibu
- Kementrian Sosial. 2012. ".*Pekerja Dan Paradigma Baru Kemiskinan*". Jakarta. Kementrian Sosial.
- Komariah, Satori. 2012. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta *Konsep dan Proses Keperawatan*). Jakarta: Salemba Medika.
- Menteri Dalam Negeri, 2007. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomer: 7 Tahun 2007 Tentang Pemberdayaan Masyarakat.
- Nugroho.R.2014. *Publik Policy Teori,Manajemen,Dinamika,Analisis,Konvergens*. Jakarta: Elex Media Komputindo.

- Soekamto dan Thabrany.2006.*Reformasi Sistem Jaminan Sosial di Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers
- Suchman, Edward A. 1967. Evaluative research: principle and praktice in publict service and social action program. New York: Russell Sage Foundation.
- Suharto, Edi. 2005. Membangun Masyarakat Memberdayakan Masyarakat : Kajian Strategi Pembangunan Kesejahteraan Sosial Dan Pekerjaan Sosial. Bandung : Refika Aditama
- ______. 2009. *Pekerjaan Sosial di Dunia Industri*. Bandung : CV Alfabeta ______. 2011. *Kebijakan Sosial dan Kebijakan Publik*. Bandung: Alfabeta Sulastomo. 2008. *Sistem Jaminan Sosial Nasional*. Jakarta: Rajawali Pers
- Suyanto, B. & Sutinah. 2005. Metode Penelitian Sosial: Alternatif Pendekatan.
- UPT Penerbitan UNEJ. 2012. *Pedoman Penulisan Karya Tulis Ilmiah*. Jember University.

Winarno, Budi. 2002. *Kebijakan Publik, Teori, dan Proses Edisi Revisi*. Yogyakarta: Media Presindo.

Jurnal

Affandi, Mochamad. 2009. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penduduk Lanjut Usia Memilih Untuk Bekerja. Journal of Indonesian Applied Economic. Vol.3 No.2 Oktober 2009.

Skripsi

- Afifi, Mohamad Faris Rifqi. 2016. *Pelayanan Sosial Lansia Terlantar di UPT Pelayanan Sosial Lanjut Usia Kabupaten Banyuwangi*. Jember: Universitas Jember.
- Rohmana, Dyah. 2014. Implementasi Peraturan Menteri Sosial Republik indonesia Nomor 19 Tahun 2012 Tentang Pedoman Pelayanan Sosial Lanjut Usia Di Dinas Sosial Daerah Istimewa Yogyakarta Unit Lanjut Usia. Yogyakarta: Universtas Islam Negeri Sunan Kalijaga.

Peraturan Perundang-undangan

Departemen Sosial Republik Indonesia

UU RI No. 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik

UU RI No. 11 Tahun 2009. Kesejahteraan Sosial. Jakarta: Sinar Grafika

UU RI No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik. Jakarta: Sinar Grafika

UU No. 23 Tahun 1992 Tentang Kesehatan

PP No. 63 Tahun 2003 tentang Pedoman Umum Pelayanan Publik

Menteri Dalam Negeri, 2007. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomer: 7 Tahun 2007 Tentang Pemberdayaan Masyarakat.

Internet

http://dialogtvnews.com/gaung-statement-faida-dinsos-bantul-belajar-ke-jember-soal-penanganan-lansia-dan-psikotik-di-upt-liposos-dinas-sosial/(24/10/18)
http://petisi.co/dinas-sosial-kota-blitar-studi-banding-di-upt-liposos-dinsos-jember/(24/10/18)

http://ejournal.litbang.depkes.go.id/(22/05/16)

https://republik2016.wordpress.com/2016/07/25/penyandang-masalah-

kesejahteraan-sosial-atau-pmks-dinas-sosial-catatan-khusus-untuk-ketua-1-

bidang-sosial-ormas-republik/(27/05/16)

https://www.scribd.com/doc/220696453/Sistem-Usaha-Kesejahteraan-

Sosial(02/06/17)

www.dinsos.jatimprov.go.id(02/06/17)

LAMPIRAN-LAMPIRAN

1. Penelitian Terdahulu

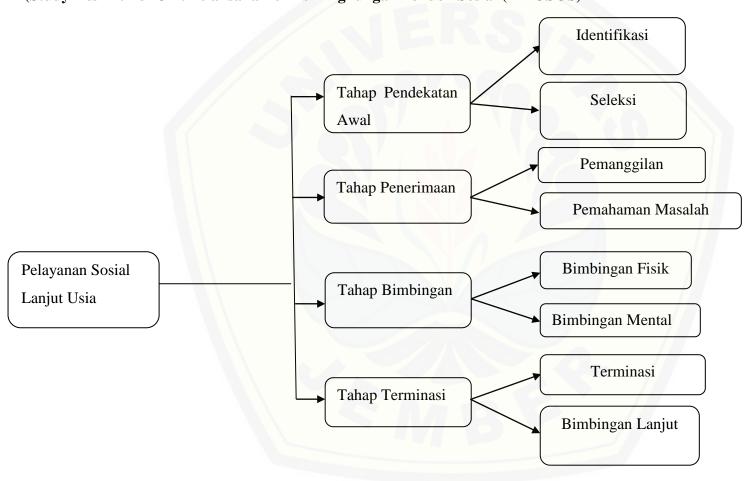
Tabel 2.1 Kajian Penelitian Terdahulu

	raber 2.1 Kajian i eneman Terdahutu		
Sasaran Telaah	Penelitian yang ditelaah		
Penulis	Dyah Rohmana	Mohamad Fariz Rifqi	
Judul Penelitian	"Implementasi Peraturan Menteri Sosial	"Pelayanan sosial Lanjut Usia	
	Republik Indonesia Nomor 19 tahun	Terlantar di UPT Pelayanan	
	2012 Tentang Pedoman Pelayanan Sosial	Sosial Lanjut Usia kabupaten	
	Lanjut Usia di Dinas Sosial Daerah	Banyuwangi"	
	Istimewah Yogyakarta Unit Lanjut Usia "		
Tahun	2014	2016	
Penelitian			
Keluaran	Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga	Jurusan Ilmu Sosial dan Ilmu	
lembaga		Politik Kesejahteraan Sosial,	
		Universitas Jember.	
1			
Rumusan	1.Bagaimanakah Implementasi Peraturan	"Pelayanan Sosial apa saja	
masalah	Menteri Sosial Republik Indonesia	yang di berikan UPT	
	Nomor 19 Tahun 2012 tentang Pedoman	Pelayanan Sosial Lanjut Usia	
	Pelayanan Sosial Lanjut Usia Di Dinas	Kabupaten Banyuwangi	
	Sosial DIY Unit Lanjut Usia (lansia)?	kepada lansia terlantar?"	
	2.Apa faktor pendukung dan penghambat		
	yang dihadapi pihak Dinas Sosial dalam		
	rangka penerapan mengenai Peraturan		
	Menteri Sosial Republik Indonesia		
	Nomor 19 Tahun 2012 tentang Pedoman		
	Pelayanan Sosial Lanjut Usia tersebut?		
	I	1	

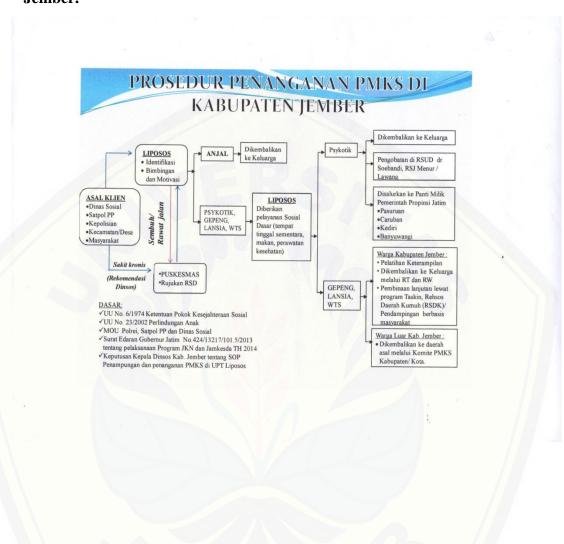
Hasil Temuan	Peran pemerintah dalam hal	UPT Lanjut Usia Banyuwangi
	implementasi Peraturan Menteri Sosial	merupakan UPT yang menjadi
	Republik Indonesia Nomor 19 Tahun	naungan dari Pemerintah
	2012 Tentang Pedoman Pelayanan	Provinsi Jawa Timur dan dana
	Sosial Lanjut Usia Di Dinas Sosial	UPT Lanjut Usia Banyuwangi
	Daerah Istimewa Yogyakarta Unit Lanjut	itu berasal dari APBN
	Usia serta faktor-faktor yang mendukung	Provinsi. Dana tersebut
	serta mempersulit pemerintah dalam	digunakan UPT Lanjut Usia
	melaksanakan peraturan tersebut.	dalam memberikan program
		atau layanan kepada lansia.
		Setiap program atau layanan
		diperlukan tahapan dalam
		pelaksanannya.
Persamaan	Sama-sama mengangkat fenomena	Membahas tentang Lansia
penelitian	terhadap Lansia Terlantar	Terlantar
Perbedaan	Dalam penelitian Dyah Rohmana melihat	Tentang pelayanan sosial yang
penelitian	semua program pelayanan sosial terhadap	diberikan merupakan
penentian	lansia yang ada di Dinas Sosial DIY	pelayanan dalam panti.
	secara keseluruhan. Sehingga peneliti	perayanan dalam panti.
	berfokus kepada seluruh program	
	pelayanan sosial.	
	polajanan sosiai.	

Sumber: Diolah berdasarkan penelusuran pustaka,2016

2. Taksonomi Penelitian Pelayanan Sosial Lansia Terlantar (LIPOSOS) Kabupaten Jember (Study Deskritif di Unit Pelaksana Teknis Lingkungan Pondok Sosial (LIPOSOS)



3. SOP (Standart Operating Prosedur) Di UPTD LIPOSOS Kabupaten Jember.





DINAS SOSIAL

Jl. PB. Sudirman Nomor 38 Telp. (0331) 487766 Jember

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS SOSIAL KABUPATEN JEMBER

Nomor: 800/ 442 /SK/35.09.423/2014

TENTANG

SOP (STANDART OPERATING PROSEDUR)
PENAMPUNGAN DAN PENANGANAN KLIEN (PMKS) DI UPTD LIPOSOS
DINAS SOSIAL KABUPATEN JEMBER

KEPALA DINAS SOSIAL KABUPATEN JEMBER

MENIMBANG

- a. Bahwa dengan dibentuknya Peraturan Bupati Nomor 41 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja UPTD Dinas Sosial Kabupaten Jember sebagai iupaya optimalisasi pelayanan pada PMKS:
- b Bahwa sesuai dengan point a tersebut perlu ditetapkan Standart Operating Prosedur Penampungan dan Penanganan Klien (PMKS) di UPTD Liposos dengan Surat Keputusan Kepala Dinas:

MENGINGAT

- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial;
- Undang-undang Nomor 13 Tahun 1998 tentang Kesejahteraa Lanjut Usia;
- Peraturan Bupati Jember Nomor 48 Tahun 2008 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Organisasi Dinas Sosial Kabupaten Jember;
- Peraturan Daerah Kabupaten Nomor 15 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Peranckat Kabupaten Jember;
- Peraturan Bupati Jember Now or 41 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata kerja Unit Pelaksana Teknis Lingkungan Pondok Sosial Kabupaten Jembe

MEMUTUSKAN:

MENETAPKAN

PERTAMA

Menetapkan Standart Operating Process (SOP) Penampungan dan Penanganan klien (PMKS) di UPTD Liposos Dinas Sosial Kabupaten Jember sebagaimana lampiran Keputusar aki;

KEDUA

Setiap Penanganan klien (PMKS) di UPTD Liposos harus berpedoman pada Standar Oparting Prosedur (SOP) ini.

KETIGA

: Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkan surat keputusan ini dibebankan pada DPA Dinas Sosial Kabupaten Jember.

KEEMPAT

: Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

> Ditetapkan di : Jember Pada Tanggal : 14 - MAREI - 2014

> > KEPALA DINAS SOSIAL

Ir. EKO HERU SUNARSO, MM

Pembina Tingkat I NIP. 19620214 199202 1 003

Tembusan Kepada Yth:

- 1. Bapak Bupati Jember
- 2. Sdr. Inspektur Kabupaten Jember.
- Sdr. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Jember

Lampiran : Surat Keputusan Kepala Dinas

Sosial Kabupaten Jember

Nomor: 800/442/35.09.423/2014

Tanggal : 14 - MARET 2014

SOP (Standart Operating Prosedur)

Penampungan dan Penanganan Klien PMKS UPT Liposos Dinas Sosial Kabupaten Jember

1. ASAL KLIEN:

- Klien yang ditampung di UPT Liposos Dinas Sosial Kabupaten Jember, berasal dari hasil Tim Operasi Simpatik Dinas Sosial, Kepolisian dan Satpol Pamong Praja.
- Klien juga bisa dikirim oleh masyarakat atau aparat yang lain, karena klien tersebut dianggap mengganggu keamanan dan ketertiban umum.
- Pengiriman klien yang ditampung di UPT Liposos Dinas Sosial Kabupaten Jember, harus dengan Berita Acara Serah Terima.

2. KLIEN SEBELUM DI UPT LIPOSOS:

- Klien yang dikirim ke UPT Liposos harus dalam keadaan sehat.
- Kalau sakit harus diperiksakan terlebih dahulu ke Puskesmas, melalui Surat dari Kelurahan/Desa.
- Camat sebagai Pembina Komite PMKS di Tingkat Kecamatan, bisa menugaskan Kasie Kesos sebagai Ketua 1 Komite PMKS di Tingkat Kecamatan untuk menangani PMKS di Kecamatan.
- Kalau dianggap parah dirujuk ke Rumah Sakit Daerah.
- Bagi klien yang sudah sembuh / rawat jalan dikirim ke Liposos
- Kesehatan PMKS akan dilayani melalui Program Jaminan Kesehatan Daerah (jamkesda) dengan menggunakan Anggaran 100 % (seratus persen) Provinsi Jawa Timur dengan dibuatkan Rekomendasi dari Dinas Sosial Kabupaten Jember.

3. PENANGANAN KLIEN DI UPT LIPOSOS:

a. Penanganan Awal:

- Klien dimandikan dan diberi pakaian khas klien Liposos.
- Identifikasi klien untuk mengetahui informasi tentang data diri klien (difoto dan didata dalam Buku Klien)

b. Penampungan Klien:

- Sesuai Jenis PMKS, Klien ditampung dalam kamar yang tersedia.
- · Memberi makan dan kebutuhan pokok lainnya.
- Memberi Kesempatan klien untuk istirahat.

c. Pemulangan Klien:

- Klien yang diketahui identitas dan alamatnya akan dipulangkan dan diberi uang saku setelah terlebih dahulu diberi pembinaan oleh petugas.
- Klien di UPT Liposos bersifat sementara.

d. Penyaluran Klien:

 Klien di UPT Liposos bersifat sementara dan akan disalurkan ke UPT Dinas Sosial Provinsi Jawa Timur, apabila tidak mempunyai/diketahui tempat tinggalnya (klien dalam keadaan sehat).

e. Pembinaan Klien:

- Klien yang masih produktif, diberi pelatihan dan ketrampilan sesuai dengan bakatnya, supaya bisa hidup mandiri dan tidak turun dijalanan lagi.
- · Memperdayakan Klien yang masih produktif.

f. Perawatan Klien Sakit di UPT Liposos :

- Klien yang Psykotik perawatannya di rujuk ke RSD dr. Soebandi jember dan RSJ Menur / Lawang
- Klien yang sakit Kronis (Gepeng, Lansia, WTS) di rujuk ke RSD dr. Soebandi Jember.
- Kesehatan PMKS akan dilayani melalui Program Jamkesda dengan menggunakan Anggaran 100 % (seratus persen) Provinsi Jawa Timur dengan dibuatkan Rekomendasi dari Dinas Sosial Kabupaten Jember.

g. Perawatan Klien Meninggal di UPT Liposos:

- Klien meninggal dunia, akan dirawat jenazahnya sesuai dengan agama yang dianutnya.
- Biaya perawatan jenazah sampai dengan pemakaman ditanggung Dinas Sosial Kabupaten Jember.
- Pemakaman dilaksanakan di TPU Kelurahan Kaliwates Kecamatan Kaliwates Jl. Imam Bonjol Jember.

Ditetapkan di : Jember Pada Tanggal : 14 - MARE

Pada Tanggal: 14- MARET - 2014

KEPALA DINAS SOSIAL KABUPATEN JEMBER

Ir. EKO HERU SUNARSO, MM.

Pembina Tingkat I NIP. 19620214 199202 1 003

4. Pedoman Wawancara Penelitian

PEDOMAN WAWANCARA "PROSES PELAYANAN SOSIAL LANSIA TERLANTAR DI LIPOSOS KABUPATEN JEMBER"

Tanggal/Waktu:

Tempat : Unit Pelaksana Teknis Pelayanan Sosial Lingkungan Pondok

Sosial (LIPOSOS) Kabupaten Jember.

Tujuan : Mengetahui Pelayanan Sosial bagi Lanjut Usia Terlantar

Identifikasi Informan

Nama :
Umur :
Alamat :
Jabatan :
Lama Bekerja :

- A. Unit Pelaksana Teknis Pelayanan Sosial Lingkungan Pondok Sosial Kabupaten Jember :
 - 1. Bagaimana sejarah dari UPT Lingkungan Pondok Sosial Jember?
 - 2. Kebijakan Lembaga UPT Lingkungan Pondok Sosial Jember?
 - 3. Upaya apa yang diberikan kepada Lanjut Usia terlantar?
 - 4. Program apa saja yang dilakukan untuk Lanjut Usia terlantar?
 - 5. Apasaja proses tahap yang dilakukan Lingkungan Pondok Sosial kepada lansia?
 - 6. Solusi apa yang dilakukan oleh lembaga dalam menghadapi kendala atau hambatan yang diberikan kepada lansia?

B. Klien Liposos Lansia Terlantar:

- 1. Apa yang menyebabkan anda tinggal di UPT Lingkungan Pondok Sosial (LIPOSOS) Kabupaten Jember?
- 2. Bagaimana pelayanan sosial yang anda rasakan di UPT Lingkungan Pondok Sosial (LIPOSOS) Kabupaten Jember?

- 3. Bagaimana yang anda rasakan dengan program yang ada di UPT Lingkungan Pondok Sosial (LIPOSOS) Jember?
- 4. Tahap apa yang paling anda suka saat berapa di LIPOSOS?



5. Lampiran Koding

Pelayanan Sosial Lansia Terlantar Di Lingkungan Pondok Sosial (LIPOSOS) Jember (Studi Deskriptif di Lingkungan Pondok Sosial (LIPOSOS) Kabupaten Jember.

No	Keterangan	Koding	Transkip
1	Pelayanan Sosial Terhadap Lansia Terlantar	PSLT	"Seseorang dapat dikatakan sebagai lansia apabila usianya mencapai 60 tahun keatas dimana terjadi penerunan kondisi secara fisik. Biasanya kan orang mengatakan kalau sudah tua itu kembali seperti anak-anak lagi mas. Jadi mereka itu harus lebih diperhatikan, dirawat, dijaga seperti itu". "Dinas sosial merupakan instansi pemerintahan yang brkewajiban untuk menangini berbagai masalah-masalah sosial, khususnya
			lansia terlantar yang ada di Kabuaten Jember. Setidaknya ada sekitar 29 PMKS yang ada salah satunya adalah lansia terlantar. Ada beberapa upaya pelayanan yang diberikan diantaran ya adalah pemberdayaan ,pengayoman , perlindungan, dan perawatan." "Di Jawa Timur 7 UPT ada di jember, bondowoso, banyuwangi, jombang, magetan, blitar, jombang dan pandaan kita masin mencari formulasi satu rumpun dari 7 UPT " (PW)

"Kalau menurut saya ya mas lansia itu merupakan kondisi dimana seseorang itu secara fisiknya sudah mengalami banyak penurunan, dia sudah mulai rentan terhadap penyakit, lebih sensitif lagi. Mereka itu butuh perhatian karena kayak kembali seperti anakanak lagi gitu mas. Rata-rata usianya ya sudah tidak produtif lagi sekitar 60 tahun ke atas lah.

"UPT disini mas merupakan UPT Naungan Provinsi. Dananya pun diambil dari APBN Provinsi ". (MJ)

"Dinas sosial mempuyai kewajiban memberikan pengayoman, perlindungan, perawatan, pemberdayaan dan juga membantu PMKS. Salah satunya adalah lansia terlantar. Di kabupaten jember sejak adanya liposos sudah menginventarisasi, mencatat semua lansia di Kabupaten Jember dan juga memberikan bantuan terhadap mereka. Bagi mereka yang masih produktif dan bisa diberdayakan akan diberikan pelatihan seperti menyulam, membordir dan lain sebagainya. Bagi mereka yang tidak bisa diberdayakan alias home care maka akan disuport dengan bantuan permakanan atau sembako sepanjang itu"

"UPT disini merupakan UPT milik pemerintah provinsi jawa

		timur, dana disini murni dari APBD provinsi." (BR) "Selama saya disini Perlakuannya sangat baik dari pihak Lipo saya banyak bersyukur ada disini dibandingkan ada di pin jalan yang tidak tahu harus kemana tujuan saya. Setiap hari saya diperhatikan dengan baik, rama-rama saat saya ada masa di kesehatan." (BA)	
2	Tahap Pendekatan Awal	TPA	"Pendekatan Awal yang dilakukan disini itu melalui pendekatan mas. Biasanya itu kita menyiapkan program program yang nantinya akan diberikan, mencari dukungan dari pihak pemerintah daerah atau pusat yang akan membantu kami disini dalam memberikan layanan dan sosialisasi kepada masyarakat tentang program-program yang akan diberikan nantinya". (MS) "Pendekatan Awal ya mas, itu ada menyiapkan rencana program yang akan diberikan, kita mencari dukungan mas baik dari pemerintah pusat ataupun pemerintah setempat yang ada disini mas seperti kabupaten, kecamatan dan desa agar mereka bisa membantu kami dalam memberikan

layanan nanti setelah itu semua selesai kita langsung melakukan sosialisasi kepada masyarakat sekitar tentang program yang tadi kita siapkan sebelumnya". (MJ)

"Ada beberapa sarana dan prasarana yang menunjang pelayan di LIPOSOS (Lingkungan Pondok Sosial) Jember ini mas diantaranya adalah Kebutuhan papan, tempat tidur, bantal, lemari. Kalau dari kebersihan diri klien dapat sabun cuci dan mandi, sampo, pasta gigi, sikat gigi. Dari kebutuhan pakaian harian, sholat dan olahraga minimal 5 kali setahun". (PW)

"Pertama saya di sini terlebih dahulu di data, setelah ada pendataan saya di beri arahan prosedur yang ada di lingkungan pondok sosial (LIPOSOS). Ini saya diberi kamar lemari, kasur, bantal, guling, dan selimut. Kamar mandi dan dapurnya juga ada itu" (IS)

"Sarana dan prasarana disini ya kamar ada lemari, tempat tidur lengkap sama bantal guling dan selimut. Ada peralatan makan, peralatan mandi. Terus disini ada 8 ruangan yang cukup untuk menampung 3-6 orang mas. Ada kamar mandi yang bersih. Selain

			itu ada juga mobil untuk mengantar klien ke rumah atau pun ke rumah sakit jika ada klien yang sakit dan memungkinan untuk di rujuk ke Rumah Sakit. Biasanya kita yang mendampingi kalau tidak ya suka relawan yang nantinya kami suport dengan uang makan dan transport gitu". (MJ)
3	Tahap Penerimaan	TPN	"Lansia yang ada disini itu lansia berasal dari lingkungan sekitar yang terjaring oleh satpoll PP,Polisi,ataupun dari kantor desa. Kemudian membawa kesini di Lingkungan Pondok Sosial Liposos untuk mendapatkan arahan dan masukan terhadap lansia terlantar. Lansia yang terjaring biasanya yang tidur depan took-toko, di pinggir jalan dan di lampu merah. (PBR) "Yang terpenting disini itu kriteria lansia terlantar, usia minimum 60 tahun keatas, harus ada surat keterangan sehat jasmani dan rohani, dan surat dan pengantar dari lembaga-lembaga terkait contohnya dari desa, kecamatan ataupun dari dinas sosial. Orang yang kurang dari 60 tahun belom dinyatakan Lanjut Usia." (PW) "Penerimaan disini yang di maksut antara lain mencatat data-

			datanya mbah-mbah yang dari puskesmas dan dari lembaga atau dinas yeng membawa mbah kesini seperti satpol pp terus tahap penempatan dalam asrama yang telah di tentukan". (MJ) "Persyaratan menjadi calon lanjut usia disini saya dulu terlantar sampai tidur emperan jalan, meskipun saya punya keluarga tetapi saya tidak diurus sampai saya diserahkan kesini, saya bisa merawat diri saya sendiri seperti mandi, cuci baju saya bisa sendiri, saya tidak cacat. Seperti itu kan syarat-syarat masuk sini". "Saya masuk kesini itu awalnya dicatat identitas saya terus saya ditauruh dikamar sini dikasih kasur, bantal, selimut, pakaian lemari segala macem dikomplitin segala macamnya, alat mandi sabun, shampoo, siakat gigi dan pasta gigi". (IA)
4	Tahap Bimbingan	Tbn	"Biasanya kita disini melakukan pendekatan kepada lansia yang masuk kesini. Pendekatan dilakukan supaya kita bisa mengetahui identitas dan permasalahan yang sedang dialami oleh lansia tersebut. Seperti Bimbingan Fisik dan Mental tersebut sering kita lakukan supaya setiap lansia yang datang kesini kita bisa memberikan layanan yang tepat untuk mengatasi masalah yang dihadapinya". (MJ)

		I E	"Kita disini melakukan Bimbingan Fisik dan Mental supaya kita bisa memperoleh data-data lansia yang dititipkan disini. Begini kan setiap lansia itu mempunyai permasalahan yang berbeda beda sehingga lansia tersebut dirasa tepat untuk memperoleh identitas sekaligus permasalahan yang sedang dihadapi lansia tersebut. Hal tersebut menjadi acuan bagi kami dalam memberikan layanan yang baik supaya lansia tersebut bisa merasa nyaman berada disini dan di akhir hidupnya lansia bahagia dengan pelayanan Lingkungan Pondok Sosial." (MS)
5	Terminasi	TMSI	"Tahap ini, tahap terakhir yang ada di Liposos Jember Lansia disini kita kembalikan kepada keluarganya karena Liposos sendiri hanya tempat sementara bukan tempat untuk selamanya. setelah di beri pelayanan sosial dan ada juga yang sampai meninggal disini. Kalau meninggal disini langsung di makamkan juga di TPU LIPOSOS, bagi lansia yang meninggal disini dan di beritahukan kepada saudara atau keluarganya. Kalau meninggal di Rs Dr Soebandi itu menjadi tanggung jawab Rumah Sakit dan lansung dimakamkan juga. (PW)

"Kalau lansia disini ada yang dikembalikan ke keluarganya ada juga yang sampai dimakam disini. Biasanya disini kalau lansia meninggal petugas menelpon keluarganya bagi yang punya keluarga tapi ada keluarganya yang tidak mau mengambil lansia disini terus kami kubur sini mas. Kebanyakan alasan keluarga faktor ekonomi,faktor tidak bisa merawat, dan sampai ada alasan keluarga menelantarkan orang tua karena semasa hidupnya anak tidak di urus dengan baik. Atau kurangnya kasih sayang terhadap anak." (MJ)

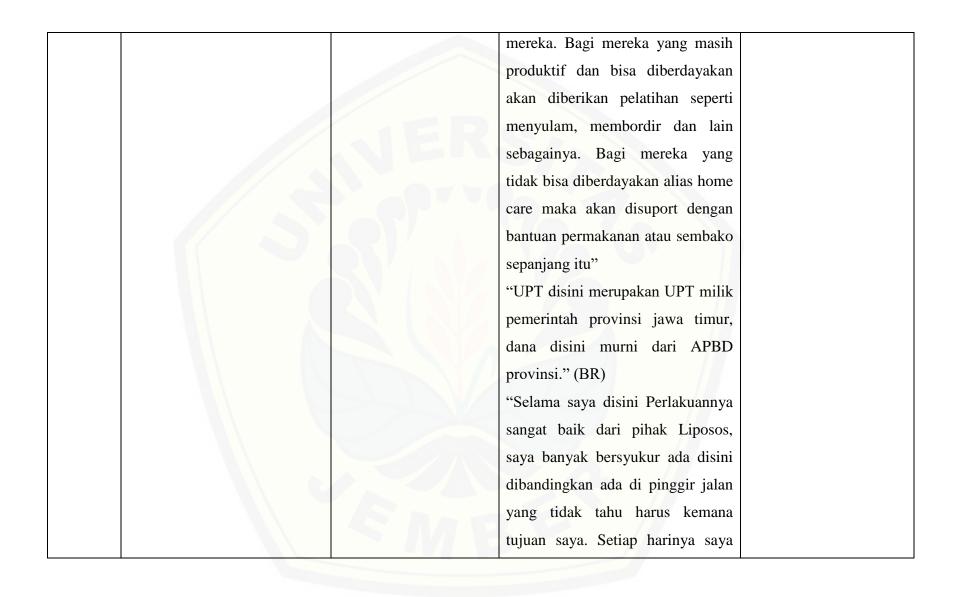
"untuk tahapan ini kan tahapan akhir jadi setelah kita beri pelayanan disini kalau sudah tau alamatnya dimana ya kita kembalikan, kan disini ya tempat penampungan sementara. Setelah ketemu keluarganya kita kasih motivasi dan arahan untuk keluarganya supaya klien kita ini tidak ditelantarkan lagi atau sampai terbengkalai. Kalau pihak keluarga tidak mau menerima ya biasanya kita kirim ke Kasian yang milik pemerintah provinsi itu rujukan kita yang terakhir." (MS)

6. Lampiran Analisis,Kesimpulan awal dan Kesimpulan akhir Pelayanan Sosial Lansia Terlantar Di Lingkungan Pondok Sosial (LIPOSOS) Kabupaten Jember (Studi Deskiptif di UPT Lingkungan Pondok Sosial (LIPOSOS) Kabupaten Jember)

Kode	Kategorisasi	Kesimpulan Awal	Triangulasi	Kesimpulan Akhir
PSLT	Pelayanan Sosial Lansia	Pada Pelayanan Sosial	"Seseorang dapat dikatakan	Pada Pelayanan Sosial
	Terlantar yang di lakukan	Lansia Terlantar yang	sebagai lansia apabila usianya	Lansia di LIPOSOS ada
	oleh lingkungan pondok	ada di Lingkungan	mencapai 60 tahun keatas dimana	kategori klien dimana
	sosial (LIPOSOS)	Pondok Sosial	terjadi penerunan kondisi secara	Lansia yang harus
		(LIPOSOS) terdapat	fisik. Biasanya kan orang	berusia 60 tahun keatas
		beberapa tahapan yang	mengatakan kalau sudah tua itu	
		di lakukan Liposos	kembali seperti anak-anak lagi	
		Jember	mas. Jadi mereka itu harus lebih	
			diperhatikan, dirawat, dijaga	
			seperti itu".	
			"Dinas sosial merupakan instansi	
			pemerintahan yang brkewajiban	
			untuk menangini berbagai	
			masalah-masalah sosial, khususnya	
			lansia terlantar yang ada di	

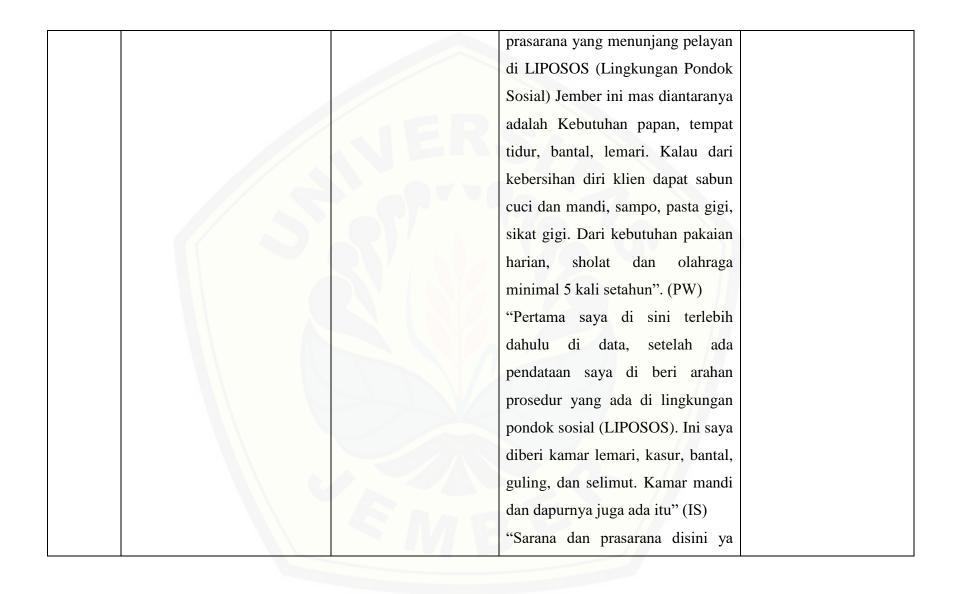
Kabuaten Jember. Setidaknya ada sekitar 29 PMKS yang ada salah satunya adalah lansia terlantar. Ada beberapa upaya pelayanan yang diberikan diantaran ya adalah pemberdayaan ,pengayoman perlindungan, dan perawatan." "Di Jawa Timur 7 UPT ada di jember, bondowoso, banyuwangi, jombang, magetan, blitar, jombang dan pandaan kita masin mencari formulasi satu rumpun dari 7 UPT " (PW) "Kalau menurut saya ya mas lansia itu merupakan kondisi dimana seseorang itu secara fisiknya sudah mengalami banyak penurunan, dia sudah mulai rentan terhadap penyakit, lebih sensitif lagi.

Mereka itu butuh perhatian karena kayak kembali seperti anak-anak lagi gitu mas. Rata-rata usianya ya sudah tidak produtif lagi sekitar 60 tahun ke atas lah. "UPT disini mas merupakan UPT Naungan Provinsi. Dananya pun diambil dari APBN Provinsi ". (MJ) "Dinas sosial mempuyai kewajiban memberikan pengayoman, perlindungan, perawatan, pemberdayaan dan juga membantu PMKS. Salah satunya adalah lansia terlantar. Di kabupaten jember sejak adanya liposos sudah menginventarisasi, mencatat semua lansia di Kabupaten Jember dan juga memberikan bantuan terhadap



			diperhatikan dengan baik, rama- rama saat saya ada masalah di kesehatan." (BA)	
TPA	Tahap Pendekatan Awal yang di lakukan lingkungan Pondok Sosial LIPOSOS Jember	Pada tahap ini di jelaskan prosedur awal penerimaan klien hingga klien bisa di kategorikan Lanjut Usia Terlantar	"Pendekatan Awal yang dilakukan disini itu melalui pendekatan mas. Biasanya itu kita menyiapkan program program yang nantinya akan diberikan, mencari dukungan dari pihak pemerintah daerah atau pusat yang akan membantu kami disini dalam memberikan layanan dan sosialisasi kepada masyarakat tentang program-program yang akan diberikan nantinya". (MS) "Pendekatan Awal ya mas,	Pendekatan awal gunanya untuk memahami masalah yang dialami klien, dan untuk menjadikan acuan di tahap selanjutnya

itu ada menyiapkan rencana
program yang akan
diberikan, kita mencari
dukungan mas baik dari
pemerintah pusat ataupun
pemerintah setempat yang
ada disini mas seperti
kabupaten, kecamatan dan
desa agar mereka bisa
membantu kami dalam
memberikan layanan nanti
setelah itu semua selesai kita
langsung melakukan
sosialisasi kepada
masyarakat sekitar tentang
program yang tadi kita
siapkan sebelumnya". (MJ)
"Ada beberapa sarana dan
Ada ocociapa sarana dan



			kamar ada lemari, tempat tidur	
			lengkap sama bantal guling dan	
			selimut. Ada peralatan makan,	
			peralatan mandi. Terus disini ada 8	
			ruangan yang cukup untuk	
			menampung 3-6 orang mas. Ada	
			kamar mandi yang bersih. Selain	
			itu ada juga mobil untuk	
			mengantar klien ke rumah atau pun	
			ke rumah sakit jika ada klien yang	
			sakit dan memungkinan untuk di	
			rujuk ke Rumah Sakit. Biasanya	
			kita yang mendampingi kalau tidak	
			ya suka relawan yang nantinya	
			kami suport dengan uang makan	
			dan transport gitu". (MJ)	
TPN	Tahap Penerimaan klien di	Pada Tahap I	ni "Lansia yang ada disini itu lansia	Dapat disimpulkan
	Lingkungan Pondok Sosial	mendalami proses yar	g berasal dari lingkungan sekitar	UPTD Lingkungan
		telah ada yaitu SC	P yang terjaring oleh satpoll	Pondok Sosial

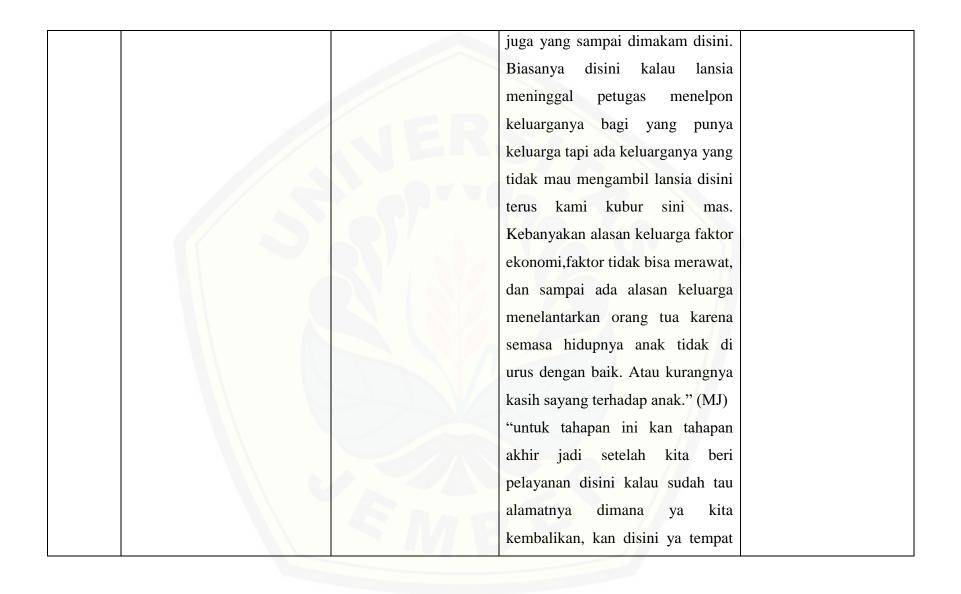
PP,Polisi,ataupun dari kantor desa. (LIPOSOS) Kabupaten sesuai dengan dan PerUndang-Undangan Kemudian membawa kesini di Jember penangannya penerimaan Lingkungan Pondok sesuai dengan prosedur untuk Sosial Klien LIPOSOS Liposos untuk mendapatkan arahan yang berlaku Jember dan masukan terhadap lansia terlantar. Lansia yang terjaring biasanya yang tidur depan tooktoko, di pinggir jalan dan di lampu merah. (PBR) "Yang terpenting disini itu kriteria lansia terlantar, usia minimum 60 tahun keatas, harus ada surat keterangan sehat jasmani dan rohani, dan surat dan pengantar lembaga-lembaga dari terkait contohnya dari desa, kecamatan ataupun dari dinas sosial. Orang yang kurang dari 60 tahun belom dinyatakan Lanjut Usia."

(PW) "Penerimaan disini yang di maksut antara lain mencatat data-datanya mbah-mbah yang dari puskesmas dan dari lembaga atau dinas yeng membawa mbah kesini seperti satpol pp terus tahap penempatan dalam asrama yang telah di tentukan". (MJ) "Persyaratan menjadi calon lanjut usia disini saya dulu terlantar sampai tidur emperan jalan, meskipun saya punya keluarga tetapi saya tidak diurus sampai saya diserahkan kesini, saya bisa merawat diri saya sendiri seperti mandi, cuci baju saya bisa sendiri, saya tidak cacat. Seperti itu kan syarat-syarat masuk sini".

					"Saya masuk kesini itu awalnya	
					dicatat identitas saya terus saya	
					ditauruh dikamar sini dikasih	
					kasur, bantal, selimut, pakaian	
				A EN	lemari segala macem dikomplitin	
					segala macamnya, alat mandi	
					sabun, shampoo, siakat gigi dan	
					pasta gigi". (IA)	
TBN	Tahap	Bimbingan	kepada	Tahap ini sendiri, tahap	"Biasanya kita disini melakukan	Dapat di simpulkan
	klien			dimana Lingkungan	pendekatan kepada lansia yang	tahap bimbingan ini
				Pondok Sosial	masuk kesini. Pendekatan	sangat membantu bagi
				melakukan aktifitas	dilakukan supaya kita bisa	klien yang terlantar,
				pelayanan kepada klien	mengetahui identitas dan	adanya tahap ini pekerja
				Lanjut Usia Terlantar	permasalahan yang sedang dialami	sosial dan pekerja sosial
					oleh lansia tersebut. Seperti	medis dapat mengetahui
					Bimbingan Fisik dan Mental	kemajuan setiap hari
					tersebut sering kita lakukan supaya	yang dialami klien.
				E no m	setiap lansia yang datang kesini	
					kita bisa memberikan layanan yang	

tepat untuk mengatasi masalah yang dihadapinya". (MJ) "Kita disini melakukan Bimbingan Fisik dan Mental supaya kita bisa memperoleh data-data lansia yang dititipkan disini. Begini kan setiap lansia itu mempunyai permasalahan yang berbeda beda sehingga lansia tersebut dirasa tepat untuk memperoleh identitas sekaligus permasalahan yang sedang dihadapi lansia tersebut. Hal tersebut menjadi acuan bagi kami dalam memberikan layanan yang baik supaya lansia tersebut bisa merasa nyaman berada disini dan di akhir hidupnya lansia dengan pelayanan bahagia Lingkungan Pondok Sosial." (MS)

TMSI	Terminasi tahap terakhir di	Tahap ini menjelaskan	"Tahap ini, tahap terakhir yang ada	Dapat di simpulkan
	Lingkungan Pondok Sosial	klien yang telah di	di Liposos Jember Lansia disini	bawasanya UPTD
	(LIPOSOS) Jember	antar ke tempat tinggal	kita kembalikan kepada	Lingkungan Pondok
		asalnya atau meninggal	keluarganya karena Liposos sendiri	Sosial (LIPOSOS)
		di UPT Lingkungan	hanya tempat sementara bukan	Kabupaten Jember
		Pondok Sosial Jember	tempat untuk selamanya. setelah di	hanya menerima klien
			beri pelayanan sosial dan ada juga	sementara di karenakan,
			yang sampai meninggal disini.	Di UPTD Lingkungan
			Kalau meninggal disini langsung	Pondok Sosial Liposos
			di makamkan juga di TPU	Bukan tempat untuk
			LIPOSOS, bagi lansia yang	selamanya kecuali
			meninggal disini dan di	meninggal.
			beritahukan kepada saudara atau	
			keluarganya. Kalau meninggal di	
			Rs Dr Soebandi itu menjadi	
			tanggung jawab Rumah Sakit dan	
			lansung dimakamkan juga. (PW)	
		R no -	"Kalau lansia disini ada yang	
			dikembalikan ke keluarganya ada	



penampungan sementara. Setelah
penampungan sementara. Setelan
ketemu keluarganya kita kasih
motivasi dan arahan untuk
keluarganya supaya klien kita ini
tidak ditelantarkan lagi atau
sampai terbengkalai. Kalau pihak
keluarga tidak mau menerima ya
biasanya kita kirim ke Kasian yang
milik pemerintah provinsi itu
rujukan kita yang terakhir." (MS)

Digital Repository Universitas Jember

7. Dokumentasi Penelitian

DOKUMENTASI



Kepala UPT LIPOSOS (**Informan BW**)



Pekerja Sosial UPT LIPOSOS (Wawancara Bersama Informan BJ)



Pekerja Sosial Medis UPT LIPOSOS (Informan MS)



Kepala Bidang Rehabilitas Di Dinas Sosial Kabupaten Jember (Wawancara Informan BR)



Salah satu kegiatan setiap pagi Memandikan semua Lansia Terlantar



Aktifitas setiap pagi pegawai LIPOSOS membersihkan halaman dan ruangan klien Lansia Terlantar



Klien Lansia Terlantar Di Lingkungan Pondok Sosial (LIPOSOS) Jember



Setiap 1 Bulan sekali ada kunjungan dari Dokter yang mewakili RS Dr.Soebandi Jember.

8. Surat Penelitian



PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

Jalan Letjen S Parman No. 89 🖀 337853 Jember

Kepada

Yth. Sdr. Kepala Dinas Sosial Kab. Jember

di

TEMPAT

SURAT REKOMENDASI

Nomor: 072/2062/314/2017

Tentang

PENELITIAN

Dasar : 1. Peraturan Daerah Kabupaten Jember No. 6 Tahun 2012 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kab. Jember

2. Peraturan Bupati Jember No. 46 Tahun 2014 tentang Pedoman Penertiban Surat

Rekomendasi Penelitian Kabupaten Jember.

Memperhatikan : Surat Ketua Lembaga Penelitian Universitas Jember tanggal 16 Pebruari 2017 Nomor :

0219/UN25.3.1/LT/2016 perihal Ijin Melaksanakan Penelitian

MEREKOMENDASIKAN

Nama / NIM. : Akhmad Khemal Praditama 120910301083

Instansi : FISIP / Kesejahteraan Sosial / Universitas Jember

Alamat : Jln. KH. Shiddiq 33/1 Jember

Keperluan : Melaksanakan Penelitian dengan judul :

"Implementasi Program Penyandang Masalah Strategi Pendampingan Kesejahteraan

Sosial (PMKS) Lansia Terlantar di Lingkungan Pondok Sosial (LIPOSOS) Kab. Jember".

Lokasi : Dinas Sosial dan UPT Liposos Kabupaten Jember

Waktu Kegiatan : 16 Pebruari s/d 16 April 2017

Apabila tidak bertentangan dengan kewenangan dan ketentuan yang berlaku, diharapkan Saudara memberi bantuan tempat dan atau data seperlunya untuk kegiatan dimaksud.

Pelaksanaan Rekomendasi ini diherikan dengan ketentuan :

1. Kegiatan dimaksud benar-benar untuk kepentingan Pendidikan

2. Tidak dibenarkan melakukan aktivitas politik

3. Apabila situasi dan kondisi wilayah tidak memungkinkan akan dilakukan penghentian kegiatan.

Demikian atas perhatian dan kerjasamanya disampaikan terima kasih.

itetapkan di : Jember

Tanggal : 21-02-2017

An. KEPALA BAKESBANG DAN POLITIK

KABUPATEN DEMBER

Sekretaris

Pembina Tingkat I NP. 195907131982111001

Tembusan

Yth. Sdr. :

1. Ketua Lembaga Penelitian Universitas Jember

2. Ybs.



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI **UNIVERSITAS JEMBER** LEMBAGA PENELITIAN

Alamat : Jl. Kalimantan No. 37 Jember Telp. 0331-337818, 339385 Fax. 0331-337818 e-Mail : penelitian.lemlit@unej.ac.id

Nomor

:0219/UN25.3.1/LT/2017

16 Februari 2017

Perihal

: Permohonan Ijin Melaksanakan

Penelitian

Yth. Kepala

Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan

Perlindungan Masyarakat Kabupaten Jember

di -

Memperhatikan surat Pengantar dari Pembantu Dekan I Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember Nomor: 622/UN25.1.2/LT/2017 tanggal 10 Februari 2017, perihal ijin penelitian mahasiswa:

Nama / NIM

: Akhmad Khemal Praditama / 120910301083

Fakultas / Jurusan : FISIP / Kesejahteraan Sosial

Alamat Judul Penelitian : Jl. KH. Siddiq 33/1 Jember / No. Hp 081236833305

: Implementasi Program Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lansia Terlantar di Lingkungan Pondok Sosial (LIPOSOS)

Kabupaten Jember

Lokasi Penelitian

: 1. Dinas Sosial Kabupaten Jember

2. UPT. Lingkungan Pondok Sosial (LIPOSOS) Kabupaten Jember

Lama Penelitian

: Dua Bulan (16 Februari - 16 April 2017)

maka kami mohon dengan hormat bantuan Saudara untuk memberikan ijin kepada mahasiswa yang bersangkutan untuk melaksanakan kegiatan penelitian sesuai dengan judul di atas.

Demikian atas kerjasama dan bantuan Saudara disampaikan terima kasih.

ALP 196403251989021001

Tembusan Kepada Yth.:

- Dekan Fak.ISIP Universitas Jember
- Mahasiswa ybs
- Arsip



CERTIFICATE NO : QMS/173